



DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

Jl. Supratman No. 73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH / LKIP

TAHUN
2020



dinkes.bandung.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan	I - 2
C. Tugas dan Fungsi	I - 2
D. Isu Strategis	I - 5
E. Landasan Hukum	I - 7
F. Sistematika	I - 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1.1. Rencana Strategi	II - 1
A. Tujuan dan Sasaran	II - 2
B. Indikator Kinerja Utama	II - 4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II - 6
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2020	II - 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	III - 1
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020	III - 4
B.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	III - 7
B.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	III - 14
B.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	III - 38
B.4. Sasaran 4 : Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	III - 94
BAB IV PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung	II - 3
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	II - 5
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	II - 6
Tabel 2.4	Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	II - 7
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	III - 4
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	III - 5
Tabel 3.4	Pencapaian Target Sasaran	III - 5
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	III - 6
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Indikator : Meningkatnya Rumah Sehat Tahun 2020	III - 8
Tabel 3.7	Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Indikator : Meningkatnya Rumah Sehat Tahun 2019 dan Tahun 2020	III - 9
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung Tahun 2020	III - 10
Tabel 3.9	Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Tahun 2020	III - 11
Tabel 3.10	Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Sasaran 1 : Meningkatnya Rumah Sehat Tahun 2020	III - 11

		Hal
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2020	III - 12
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Budaya Hidup Sehat Tahun 2020	III - 14
Tabel 3.13	Sebaran Balita Gizi Buruk Per Kecamatan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020	III - 17
Tabel 3.14	Perbandingan Indikator Kinerja Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2018 , 2019 dan 2020	III - 19
Tabel 3.15	Gambaran Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri Tahun 2020	III - 20
Tabel 3.16	Data Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019	III - 23
Tabel 3.17	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya Kelurahan Siaga Aktif Purnama Dan Mandiri Tahun 2019 dan 2020	III - 24
Tabel 3.18	Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2020	III - 29
Tabel 3.19	Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung Tahun 2023	III - 32
Tabel 3.20	Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	III - 33
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	III - 34
Tabel 3.22	Effisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020	III - 37
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 38
Tabel 3.24	Penyebab Kematian Ibu Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020	III - 40
Tabel 3.25	Sebaran Kematian Ibu Per Kecamatan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020	III - 41
Tabel 3.26	Penyebab Kematian Bayi Triwulan I s.d IV Tahun 2020	III - 45

	Hal	
Tabel 3.27	Sebaran Kematian Bayi Per Kecamatan Triwulan I s.d IV Tahun 2020	III - 46
Tabel 3.28	Analisis Data Laporan IKM Berdasarkan Data Tiap Unsur Pelayanan Tahun 2020	III - 53
Tabel 3.29	Pengelolaan Data Keluhan Masyarakat Tahun 2020	III - 57
Tabel 3.30	Rincian Nilai IKM Puskesmas Tahun 2020	III - 67
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019 dengan Tahun 2020	III - 71
Tabel 3.32	Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung Tahun 2023	III - 75
Tabel 3.33	Indikator Kinerja Program dan Realisasi Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 69
Tabel 3.34	Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 79
Tabel 3.35	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2020	III - 92
Tabel 3.36	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kepesertaan Masyarakat Miskin Mendapatkan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 94
Tabel 3.37	Pencapaian Indikator Sasaran 4 Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung Tahun 2023	III - 95
Tabel 3.38	Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun 2020	III - 96
Tabel 3.39	Indikator Kinerja Program dan Realisasi Sasaran 4 : Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan Tahun 2020	III - 97
Tabel 3.40	Indikator kinerja kegiatan dan Realisasi Sasaran 4 : Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan Tahun 2020	III - 97
Tabel 3.41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Sasaran 4 Tahun 2020	III - 98

		Hal
Tabel 3.42	Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	III - 100
Tabel 3.43	Perbandingan Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019 dan Tahun 2020	III - 101
Tabel 3.44	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020	III - 102
Tabel 3.45	Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat Tahun 2020	III - 103
Tabel 3.46	Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Budaya Hidup Sehat Tahun 2020	III - 104
Tabel 3.47	Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 105
Tabel 3.48	Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Kepesertaan Masyarakat Miskin Mendapatkan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	III - 112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat Ridho dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2020. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Bandung, 25 Januari 2021
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG**



Dr.Hj. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196207163 198803 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2020.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam Periode 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 .

Pada Tahun 2020 , pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 sasaran , 8 indikator kinerja. Secara umum diperoleh hasil bahwa 6 indikator (75 %) melebihi/melampaui target, 1 indikator (12,5%) sesuai target, dan 1 indikator (12,5%) Tidak Mencapai Target.

Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator tersebut di atas adalah :

1. **Meningkatnya Rumah Sehat** , faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. Optimasi kegiatan perbaikan rumah /Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Kelurahan ODF (akses sanitasi dasar/ jamban sehat meningkat sebanyak 5% dari tahun 2019)
 - c. Meningkatnya akses air minum sebagai salah satu indikator penunjang rumah sehat

2. **Menurunnya persentase balita gizi buruk** , faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. sistem surveilans gizi melalui aplikasi e-PPGBM, sehingga setiap penemuan kasus gizi buruk dapat langsung dilakukan penanganan intervensi sesuai standar berupa pemberian makanan tambahan (PMT) Pemulihan maupun peningkatan pemahaman ibu dan keluarga mengenai pengasuhan serta asupan gizi seimbang melalui konseling terintegrasi.
 - b. Keberadaan kader posyandu yang aktif di tiap wilayah menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target dimana para kader di Kota Bandung mempunyai wadah organisasi khusus berupa FORKAGI (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader FORKAGI ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.
3. **Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri**, faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. Peningkatan peran serta aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan kelurahan siaga aktif
 - b. Meningkatnya dukungan Camat dan Lurah dalam pembuatan peraturan ataupun koordinasi dengan sektor kesehatan untuk kegiatan kelurahan siaga aktif
 - c. Meningkatnya dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha terutama untuk penanggulangan Siaga Covid 19
4. **Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)** ,faktor pendorongnya adalah;
 - a. Pendistribusian Buku KIA tahun 2020 telah mencakup semua sasaran ibu hamil di Kota Bandung sehingga pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor dapat

digunakan secara optimal dalam pemantuan kesehatan pada ibu hamil. Dengan terdistribusinya buku KIA maka kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas dapat dikenali sedini mungkin sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan kasus komplikasi.

- b. Peningkatan pelayanan di fasilitas Kesehatan Kota Bandung melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi dokter umum. Hal ini dapat menekan kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan upaya skrining faktor resiko.
- c. Sebagian besar ibu hamil, bersalin dan nifas di Kota Bandung telah memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas

5. **Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)** ,faktor pendorongnya adalah :

- a. Penguatan pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui peningkatan risiko komplikasi maupun tanda bahaya pada bayi serta dapat segera mengambil keputusan untuk dilakukan penanganan yang tepat dan cepat apabila terjadi kegawatdaruratan.
- b. Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung, baik penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menangani kegawatdaruratan perinatal maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada bayi melalui pelatihan serta orientasi pelayanan penanganan pra rujukan, penanganan kegawatdaruratan dan komplikasi.
- c. Kota Bandung telah memfasilitasi penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, termasuk bayi. Hal ini diharapkan dapat membantu keluarga dalam mengambil keputusan dengan cepat saat terjadi kegawatdaruratan maupun komplikasi pada bayi.

- d. Perbaiki sistem pelaporan kematian di tingkat Rumah Sakit dan Klinik, sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian bayi sudah baik
6. **Nilai IKM**, Faktor pendorong tercapainya target ini adalah karena puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah terakreditasi. Di Kota Bandung ada 66 Puskesmas yang sudah diakreditasi, sehingga baik sarana, prasarana maupun pelayanan sudah lebih baik dan tentu saja hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan puskesmas yaitu masyarakat.
7. **Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan**, factor pendorongnya adalah dengan adanya Perwal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Bagi Penduduk Kota Bandung mendorong Dinkes dapat melaksanakan pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bandung.

Adapun factor penghambat dari tidak tercapainya **Indeks Keluarga Sehat** adalah sebagai berikut :

- a. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih terbilang program baru sehingga belum dapat diselenggarakan secara optimal. Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020 semakin memperberat kondisi ini, karena Puskesmas tidak dapat melakukan kunjungan lapangan secara optimal.
- b. Ditemukan pula permasalahan dari sisi ketenagaan Puskesmas dimana saat ini tenaga kontrak yang melakukan pendataan ke lapangan semakin berkurang jumlahnya sehingga kegiatan PIS-PK menjadi terhambat.

- c. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah.
- d. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.

Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan cakupan *total coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- b. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur 30.68%, Penderita Gangguan Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan 39.59%, Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok 41.68%);
- d. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- f. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- g. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi



dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban : mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota



Adapun Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

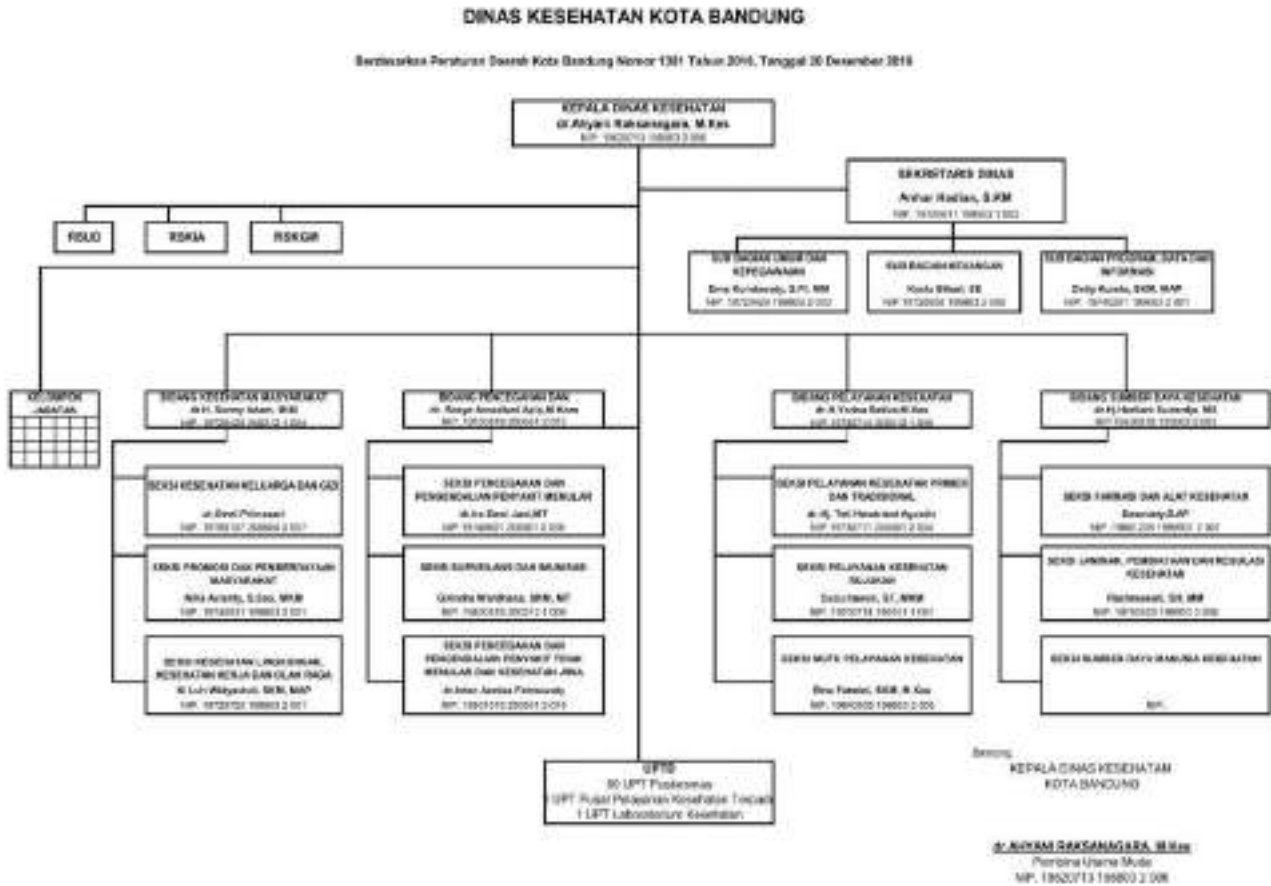
- a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;



- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- o. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup kesehatan;
- p. merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup kesehatan;
- q. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup kesehatan;
- r. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup kesehatan Daerah;
- s. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan Daerah;
- t. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- u. menyelenggarakan kesepakatan dan kerjasama dengan mitra pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- w. melaksanakan tugas lainnya dari Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh dr.Hj. AHYANI RAKSANAGARA, MKes yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.



Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit.

Ketersediaan puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008-2010 tercatat bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio puskesmas per satuan penduduk dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di Kota Bandung satu unit puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%.



Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga 200 %, hal tersebut menunjukkan adanya kegawat daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.

Permasalahan pada urusan kesehatan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- a. Integrasi aktivitas pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan belum optimal.
- b. Jumlah SDM kurang dan kualitas SDM belum memenuhi standard
- c. Pelaksanaan Administrasi (Kebijakan dan SOP) belum berjalan optimal.
- d. Penempatan SDM belum sesuai dengan beban kerja.
- e. Sistem Data dan Informasi belum terintegrasi secara optimal.
- f. Fungsi Pengawasan belum optimal.
- g. Usulan perencanaan sering kali tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya.
- h. Perubahan orientasi kerja.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Perwal Nomor 016 Tahun 2019 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 -2023 tanggal 18 April 2019

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Meningkatnya Rumah Sehat	67	68	70	72	75
		Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	71.81	71.7	71.6	71.5	71.4
			Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	2.80	2.75	2.7	2.65	2.6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	82	83



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Menurunnya persentase balita gizi buruk	0.365	0.356	0.346	0.335	0.325
			Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	8.61	11.92	15.23	18.54	21.19
			Indeks Keluarga Sehat	-	0.2	0.25	0.27	0.28
		Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin mandapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Walikota Kota Bandung Nomor : 060/Kep.497.Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Persentase Meningkatnya Rumah Sehat	Jumlah Rumah sehat dibagi Jumlah seluruh rumah dikali 100 (<i>Berdasarkan Kepmenkes no 829 tahun 1999 tentang Persyaratan kesehatan perumahan</i>)
2	Menurunnya persentase balita gizi buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk Dibagi Jumlah Seluruh Balita Dalam Satu Wilayah Pada Periode Tertentu Dikali 100%
3	Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	Jumlah kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri dibagi jumlah kelurahan siaga aktif dikali 100% . (<i>Berdasarkan Kepmenkes no 1529/menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif</i>)
4	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%
5	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	Jumlah kematian ibu dikali 100.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun
6	Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	Jumlah kematian bayi usia 0 - 1 thn dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap jenis pelayanan di seluruh Puskesmas dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dikali 100%
8	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Persentase Meningkatnya Rumah Sehat	Persen	68
2	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Menurunnya persentase balita gizi buruk	Persen	0.356
		Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	Persen	9.6
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2
3	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	100.000 Kelahiran Hidup	71.70



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	1.000 Kelahiran Hidup	2.75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79
4	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persen	100

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari 4 (empat) Sasaran dengan 8 indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 19 (Sembilan Belas) dan 177 Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1,049,702,061,757.42,-.

Tabel 2.4

Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Jumlah Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020	Ket
1	Sasaran 1	1	3	2,327,740,000.00	
2	Sasaran 2	2	4	167,669,075,660.00	
3	Sasaran 3	16	168	797,222,114,217.42	
4	Sasaran 4	-	2	82,483,131,880.00	Program sama dengan Program pada sasaran 2
	Jumlah	19	177	1,049,702,061,757.42	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata



Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Walikota Kota Bandung Nomor : 060/Kep.497.Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang



sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Meningkatnya Rumah Sehat	Persen	68	72.03	105.93	Melebihi Target
2	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Menurunnya persentase balita gizi buruk	Persen	0.356	0.305	133.44	Melebihi Target
		Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	Persen	9.6	50.33	524.27	Melebihi Target
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2	0.17	85.00	Tidak mencapai target
3	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	100.000 Kelahiran Hidup	71.70	69.03	107.74	Melebihi Target
		Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	1.000 Kelahiran Hidup	2.75	2.02	172.07	Melebihi Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	84.19	106.57	Melebihi Target
4	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	Sesuai Target

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020-2023 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Meningkatnya Rumah Sehat	68	72.03	105.93
2	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Menurunnya persentase balita gizi buruk	0.356	0.305	133.44
		Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	9.6	50.33	524.27
		Indeks Keluarga Sehat	0.2	0.17	85.00
3	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	71.70	69.03	107.74
		Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	2.75	2.02	172.07
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	84.19	106.57
4	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100	100	100



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH	%
1	Melebihi/Melampaui Target	6	75.00
2	Sesuai Target	1	12.50
3	Tidak Mencapai Target	1	12.50

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Sasaran

No	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran					
				Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1		Sasaran 1	1	1	100	-	-	-	-
2		Sasaran 2	3	2	66.67	-	-	1	33.33
3		Sasaran 3	3	3	100	-	-	-	-
4		Sasaran 4	1	-	-	1	100	-	-
	Jumlah		8	6	75.00	1	12.50	1	12.50

Dari 4 sasaran dengan 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Sasaran	8	
1	Melebihi/Melampaui Target	6	75.00
2	Sesuai Target	1	12.50
3	Tidak Mencapai Target	1	12.50

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2020-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



B.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

Rumah Sehat adalah Rumah yang minimal memenuhi kriteria akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah).

Berdasarkan Kepmenkes No. 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, seta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat akan meningkatkan risiko terhadap penyakit berbasis lingkungan bagi penghuninya. Penyakit berbasis lingkungan yang dimaksud diantaranya TBC, ISPA, diare, kecacingan, penyakit kulit, DBD, stunting, dan lain-lain.

Parameter yang dipergunakan untuk menentukan rumah sehat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, meliputi 3 lingkup kelompok komponen penilaian, yaitu:

1. Kelompok komponen fisik rumah, meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan dan pencahayaan.
2. Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah.
3. Kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela ruangan di rumah, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke



jamban sehat, membuang sampah pada tempat sampah, tidak merokok di dalam rumah

Cara Perhitungannya adalah Jumlah Rumah sehat dibagi Jumlah seluruh rumah dikali 100 berdasarkan Kepmenkes Nomor 829 tahun 1999 tentang Persyaratan kesehatan perumahan.

Jumlah indikator kinerja yang digunakan 1 indikator. Sebanyak 1 (100%) indikator sudah melebihi target, hal ini dapat dilihat seperti pada grafik dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1 :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat
Indikator : Meningkatnya Rumah Sehat
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Rumah Sehat	%	68	72.03	105.93

Capaian kinerja Indikator kinerja Meningkatnya Rumah Sehat pada tahun 2020 adalah sebesar 72,03 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 72,03% , melebihi awah target yang ditetapkan sebesar 68% .

Faktor yang mendorong tercapainya target Meningkatnya Rumah Sehat adalah Adanya :

- Optimasi kegiatan perbaikan rumah /Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Kelurahan ODF (akses sanitasi dasar/ jamban sehat meningkat sebanyak 5% dari tahun 2019)
- Meningkatnya akses air minum sebagai salah satu indikator penunjang rumah sehat



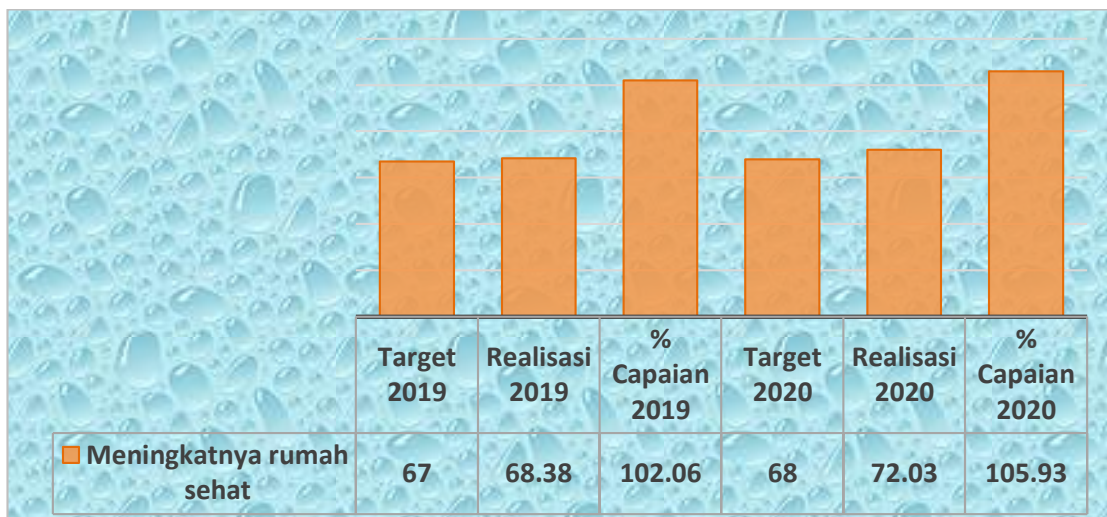
Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka realisasi rumah sehat mengalami peningkatan sebesar 3.71% dari 68.38% pada tahun 2019 menjadi 72,02% pada Tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Indikator Kinerja
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat
Indikator : Meningkatnya Rumah Sehat
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya rumah sehat	%	67	68.38	102.06	68	72.03	105.93

Perbandingan realisasi rumah antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat
Tahun 2019 dan Tahun 2020





Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa % capaian Indikator Sasaran 1 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.87%.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana telah direncanakan dalam Target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Indikator Sasaran 1
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung
Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2020	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Meningkatnya Rumah Sehat	%	72.03	75	96.04	3,96%

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2020 belum sesuai dengan Target akhir Renstra yang ditetapkan.

Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung sifatnya sangat spesifik disesuaikan dengan tugas fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung , permasalahan dan isu-isu strategis di Kota Bandung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih , hal ini menyebabkan indikator Meningkatnya Rumah Sehat yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Bandung berbeda dengan instansi lain sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan kinerjanya dengan instansi lain.

Program yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 1 ini adalah Program Pengembangan Lingkungan Sehat dimana program ini memiliki indikator kinerja programnya adalah Persentase rekomendasi



IKL yang ditindaklanjuti . Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran 1 :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat
Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
Pengembangan lingkungan sehat	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah sarana yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam bentuk perencanaan.	persentase	100	100	100

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indicator kinerja Program Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti adalah 100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Ketercapaian ini adalah karena Kegiatan IKL pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (frekuensi dan sasaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing puskesmas).

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 1 ini adalah Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat dimana kegiatan ini memiliki 4 indikator kinerja kegiatan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi
Sasaran 1 : Meningkatnya Rumah Sehat
Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi dasar	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100
	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK)	Jumlah dokumen kegiatan	Dokumen	6	6	100
		Jumlah dokumen cetak	Dokumen	1	1	100



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK Fisik)	Jumlah sanitarian kit	Paket	19	19	100

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indicator kinerja Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat sebanyak 4 indikator, semuanya (100%) telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Ketercapaian ini adalah karena adanya factor pendorong sebagai berikut :

- kegiatan IKL dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (frekuensi dan sasaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing puskesmas)
- pelaksanaan pertemuan dilakukan dengan webinar atau menerapkan protokol kesehatan
- proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai dan 19 paket sanitarian kit sudah diterima user/puskesmas

Bila dilihat dari efesiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran 1 maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.11
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Sasaran 1
Tahun 2020

No	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2020			Efesiensi
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Meningkatnya Rumah Sehat	68	72.03	105.93	2,327,740,000	2,250,312,705	96.67	9.26
		JUMLAH	68	72.03	105.93	2,327,740,000	2,250,312,705	96.67	9.26

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 1 adalah sebesar 105.93 % , sedangkan penyerapan



anggarannya sebesar 96.67 % sehingga diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 1 sebesar 9,26%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang terkait dengan indicator Meningkatnya Rumah Sehat adalah sebagai berikut :

a. Percepatan Akses Sanitasi Dasar jamban Sehat



b. Monitoring dan evaluasi ODF Kecamatan Gedebage dan Sekejati





B.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Hidup Sehat

Jumlah indikator kinerja yang digunakan adalah 3 indikator. Sebanyak 2 (66.67%) indikator sudah melebihi target, 1 indikator (33,33%) belum mencapai target, hal ini dapat dilihat seperti pada grafik dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Budaya Hidup Sehat
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%
			Target	Realisasi	
1	Menurunnya persentase balita gizi buruk	%	0.356	0.305	133.44
2	Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	%	9.6	50.33	524.27
3	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2	0.17	85

Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah dengan melihat penurunan jumlah penderita balita gizi buruk di Kota Bandung.

Balita gizi buruk adalah Jumlah balita gizi buruk dalam periode tertentu. Cara Perhitungan : Persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100 %.

Beberapa hal penyebab gizi buruk adalah :

- a. pola pemberian makan yang kurang tepat terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Praktik pemberian makan pada anak (PMBA) yang dilakukan orangtua belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu belum tepat memperhatikan ukuran, frekuensi, jumlah maupun teksturnya.



- b. Selain itu beberapa balita yang mengalami masalah gizi buruk juga memiliki penyakit penyerta maupun kelainan bawaan seperti *hidrocefalus*, TB Paru, kelainan jantung, *cerebral palsy*, *glaukoma kongenital* dan lain sebagainya. Pola pemberian makanan yang kurang tepat disertai kondisi penyakit penyerta menyebabkan status gizi balita dapat dengan mudah menjadi gizi buruk (keadaan berat badan menurut umur di bawah standar).
- c. Penyebab lain dari beberapa kasus balita gizi buruk diantaranya juga riwayat kelahiran prematur serta Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Pola perawatan balita serta praktik pemberian makan yang kurang tepat menyebabkan kondisi prematuritas ini berkelanjutan dimana balita tersebut kemudian mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan akhirnya memiliki masalah gizi seperti stunting, timbangan BGM (bawah garis merah) dan 2T (2 bulan tidak naik).
- d. Persentase bayi lulus ASI Eksklusif yang rendah juga berpengaruh terhadap kejadian balita gizi buruk. Gagalnya pemberian ASI pada 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi dapat meningkatkan kejadian infeksi karena sistem imunitas tidak terbentuk sempurna.
- e. Tingkat sosial ekonomi turut berpengaruh pada balita dengan masalah gizi. Rata-rata tingkat pendidikan orangtua balita gizi buruk berada di jenjang SD hingga SMA dengan pekerjaan sebagai buruh, pedagang, supir, atau bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pemahaman orangtua



mengenai cara menyediakan asupan yang bergizi bagi balita menjadi sangat kurang. Kondisi ini ditambah dengan daya beli yang rendah akibat tingkat ekonomi yang rendah juga sehingga sulit untuk melakukan praktik pemberian makan yang tepat.

- f. Akses sanitasi yang tidak memadai juga menjadi penyebab masalah gizi buruk di Kota Bandung. Saat ini Kota Bandung baru memiliki 7 Kelurahan dari 151 Kelurahan, yang telah dinyatakan *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Kondisi ini tentu mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan secara tidak langsung berpengaruh pada status gizi balita, dimana akses terhadap air bersih serta pengolahan makanan yang *hygiene* menjadi sulit untuk dipraktikkan.

Capaian kinerja Indikator kinerja Balita gizi buruk pada tahun 2020 adalah sebesar 133.44 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 0.305% , melebihi harapan yaitu dibawah target yang ditetapkan sebesar 0.356% .

Jumlah balita gizi buruk ini didasarkan pada indikator antropometri berat badan per umur di tahun 2020 yaitu sejumlah 526 balita (0.305%) dibandingkan dengan seluruh sasaran balita sebanyak 172.144 balita.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka jumlah balita gizi buruk tahun 2020 mengalami penurunan dari 619 menjadi 526 balita.



- Faktor yang mendorong tercapainya target adalah Adanya :
- sistem surveilans gizi melalui aplikasi e-PPGBM, sehingga setiap penemuan kasus gizi buruk dapat langsung dilakukan penanganan intervensi sesuai standar berupa pemberian makanan tambahan (PMT) Pemulihan maupun peningkatan pemahaman ibu dan keluarga mengenai pengasuhan serta asupan gizi seimbang melalui konseling terintegrasi.
 - Keberadaan kader posyandu yang aktif di tiap wilayah menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target dimana para kader di Kota Bandung mempunyai wadah organisasi khusus berupa FORKAGI (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader FORKAGI ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.

Adapun sebaran dan jumlah kasus balita gizi buruk pada triwulan I, II, III dan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Sebaran Balita Gizi Buruk Per Kecamatan
Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS BALITA GIZI BURUK (ORANG)				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukasari	UPT Sukarasa	4	4	4	5	↑
2	Sukajadi	UPT Sukajadi	16	15	18	21	↑
3	Cicendo	UPT Pasirkaliki	35	37	37	38	↑
4	Andir	UPT Garuda	15	19	19	24	↑
5	Cidadap	UPT Ciumbuleuit	6	7	7	14	↑
6	Coblong	UPT Puter	14	14	14	18	↑
7	Bandung Wetan	UPT Salam	9	10	10	10	



NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS BALITA GIZI BURUK (ORANG)				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sumur Bandung	UPT Tamblong	3	3	3	6	↑
9	Cibeunying Kaler	UPT Neglasari	7	8	10	12	↑
10	Cibeunying Kidul	UPT Padasuka	8	8	8	20	↑
11	Kiaracondong	UPT Babakan Sari	8	8	8	24	↑
12	Batununggal	UPT Ibrahim Aji	29	29	29	43	↑
13	Lengkong	UPT Talagabodas	13	13	13	18	↑
14	Regol	UPT Pasundan	1	1	1	2	↑
15	Astanaanyar	UPT Pagarsih	14	14	16	20	↑
16	Bojongloa Kaler	UPT Cetarip	8	8	8	21	↑
17	Bojongloa Kidul	UPT Kopo	21	21	26	27	↑
18	Babakan Ciparay	UPT Caringin	17	22	22	22	
19	Bandung Kulon	UPT Cibuntu	16	16	16	17	↑
20	Antapani	UPT Griya Antapani	11	11	12	17	↑
21	Mandalajati	UPT Sindangjaya	11	12	14	20	↑
22	Arcamanik	UPT Arcamanik	5	5	5	12	↑
23	Ujungberung	UPT Ujungberung Indah	19	19	20	24	↑
24	Cinambo	UPT Cinambo	15	15	19	19	↑
25	Cibiru	UPT Cibiru	5	5	5	10	↑
26	Panyileukan	UPT Panghegar	1	2	2	2	
27	Gedebage	UPT Riung Bandung	1	1	1	1	
28	Rancasari	UPT Cipamokolan	5	5	15	32	↑
29	Buahbatu	UPT Margahayu Raya	2	2	2	16	↑
30	Bandung Kidul	UPT Kujangsari	6	6	6	11	↑
JUMLAH			325	340	370	526	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah balita gizi buruk terbanyak ada di Kecamatan Batununggal 43 kasus , Cicendo sebanyak 38 kasus , Kecamatan Rancasari 32 kasus . Jika kita bandingkan Antara Triwulan III dengan , maka ada 25 Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah kasus balita gizi buruk.



Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka % capaian balita gizi buruk mengalami peningkatan dari 101,37% pada tahun 2019 menjadi 133,44% pada Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Indikator Kinerja
Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk
Tahun 2018 , 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	Realisasi	%
1	Menurunnya persentase balita gizi buruk	%	0.38	0.38	100.00	0.365	0.360	101.37	0.356	0.305	133.44

Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri adalah

Kelurahan yang :

1. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan
2. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif lebih dari Sembilan orang
3. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari
4. Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring
5. Sudah mengakomodasikan dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha
6. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif



8. Minimal 70 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Cara Perhitungan : Jumlah kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri dibagi jumlah kelurahan siaga aktif dikali 100%.

Capaian kinerja Indikator Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri pada tahun 2020 adalah sebesar 524.27 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 50.33% , melebihi harapan yaitu dibawah target yang ditetapkan sebesar 9.6% .

Faktor yang mendorong tercapainya target adalah Adanya :

- a. Peningkatan peran serta aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan kelurahan siaga aktif
- b. Meningkatnya dukungan Camat dan Lurah dalam pembuatan peraturan ataupun koordinasi dengan sektor kesehatan untuk kegiatan kelurahan siaga aktif
- c. Meningkatnya dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha terutama untuk penanggulangan Siaga Covid 19

Adapun gambaran Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Gambaran Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	UPT		JUMLAH KELURAHAN	KELURAHAN SIAGA AKTIF			
			PUSKESMAS		PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1	SUKASARI	1	Sarijadi	1	1	0	0	0
		2	Ledeng	1	0	0	0	1
		3	Sukarasa	1	1	0	0	0
		4	Karang setra	1	0	1	0	0
2	SUKAJADI	5	Sukajadi	3	3	0	0	0
		6	Sukawarna	1	0	0	1	0
		7	Sukagalih	1	0	1	0	0
3	CICENDO	8	Sukaraja	1	0	0	1	0



NO	NAMA KECAMATAN	UPT PUSKESMAS	JUMLAH KELURAHAN	KELURAHAN SIAGA AKTIF				
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	
		9	Pasirkaliki	5	0	4	1	0
4	ANDIR	10	Garuda	4	0	0	4	0
		11	Babatan	2	2	0	0	0
5	CIDADAP	12	Ciumbuleuit	2	0	2	0	0
		13	Cipaku	1	0	1	0	0
6	COBLONG	14	Puter	1	0	1	0	0
		15	Dago	3	0	3	0	0
		16	Cikutra lama	1	0	0	1	0
		17	Sekeloa	1	1	0	0	0
7	BANDUNG WETAN	18	Salam	2	0	0	2	0
		19	Taman sari	1	0	1	0	0
8	SUMUR BANDUNG	20	Tamblong	3	3	0	0	0
		21	Balaikota	1	0	0	1	0
9	CIBEUNYING KALER	22	Cigadung	1	0	0	1	0
		23	Neglasari	3	0	0	2	1
10	CIBEUNYING KIDUL	24	Padasuka	4	0	4	0	0
		25	Pasirlayung	2	0	0	2	0
11	KIARACONDONG	26	Babakan Surabaya	2	0	0	2	0
		27	Babakan Sari	4	0	0	2	2
12	BATUNUNGGAL	28	Gumuruh	3	0	0	3	0
		29	Ibrahim Aji	3	0	0	3	0
		30	Ahmad Yani	2	0	2	0	0
13	LENGKONG	31	Talaga Bodas	3	0	3	0	0
		32	Cijagra Lama	2	2	0	0	0
		33	Suryalaya	1	0	1	0	0
		34	Cijagra Baru	1	0	0	1	0
14	REGOL	35	Pasundan	2	2	0	0	0
		36	M. Ramdhan	3	0	3	0	0
		37	Pasirluyu	2	0	2	0	0
15	ASTANA ANYAR	38	Astanaanyar	1	0	1	0	0
		39	Liogenteng	1	0	0	1	0
		40	Pelindung hewan	2	0	2	0	0
		41	Pagarsih	2	0	2	0	0
16	BOJONGLOA KALER	42	Sukapakir	1	0	0	1	0
		43	Citarip	2	0	2	0	0



NO	NAMA KECAMATAN	UPT PUSKESMAS	JUMLAH KELURAHAN	KELURAHAN SIAGA AKTIF				
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	
		44	Babakan tarogong	2	0	2	0	0
17	BOJONGLOA KIDUL	45	Kopo	2	0	0	2	0
		46	Cibaduyut Kidul	2	0	0	2	0
		47	Cibaduyut Wetan	2	0	0	2	0
18	BABAKAN CIPARAY	48	Cibolerang	2	0	0	2	0
		49	Caringin	2	0	0	2	0
		50	Sukahaji	2	0	2	0	0
19	BANDUNG KULON	51	Cibuntu	3	0	3	0	0
		52	Cijerah	2	0	0	1	1
		53	Cigondewah	3	0	3	0	0
20	ANTAPANI	54	Griya Antapani	1	0	0	1	0
		55	Jajaway	1	0	0	0	1
		56	Antapani	2	0	2	0	0
21	MANDALAJATI	57	Pamulang	1	0	0	1	0
		58	Girimande					
		59	Sindang Jaya	2	0	0	2	0
		60	Jatihandap	1	1	0	0	0
		61	Mandala mekar					
22	ARCAMANIK	62	Arcamanik	2	0	0	0	2
		63	Rusunawa	2	0	0	2	0
23	UJUNGBERUNG	64	Pasirjati	2	0	0	2	0
		65	Ujung berung indah	3	0	0	2	1
24	CINAMBO	66	Cinambo	4	0	0	4	0
25	CIBIRU	67	Cibiru	1	0	1	0	0
		68	Cilengkrang	1	0	0	0	1
		69	Cipadung	2	0	0	2	0
26	PANYILEUKAN	70	Panyileukan	1	1	0	0	0
		71	Panghegar	3	2	1	0	0
27	GEDEBAGE	72	Riung Bandung	2	0	0	0	2
		73	Cempaka arum	2	0	2	0	0
28	RANCASARI	74	Cipamokolan	2	2	0	0	0
		75	Derwati	2	0	0	2	0
29	BUAHBATU	76	Margahayu raya	2	0	2	0	0
		77	Sekejati	2	0	0	0	2
30	BANDUNG KIDUL	78	Kujangsari	2	0	0	0	2
		79	Mengger	1	0	0	1	0



NO	NAMA KECAMATAN	UPT		JUMLAH KELURAHAN	KELURAHAN SIAGA AKTIF			
		PUSKESMAS			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
		80	Pasawahan	1	0	0	1	0
	Total			151	21	54	60	16

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Siaga Aktif Pratama dan Madya ada sebanyak 75 Kelurahan, sedangkan untuk Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri ada sebanyak 115 Kelurahan.

Perbandingan Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kota Bandung dengan kabupaten dan kota lain se propinsi Jabar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.16
DATA STRATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017-2019

KABUPATEN/KOTA			PRATAMA			MADYA			PURNAMA			MANDIRI		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Kabupaten	Bogor	75,12	63,68	58,16	21,20	28,51	37,93	3,00	6,21	1,84	0,69	1,61	2,07
2	Kabupaten	Sukabumi	2,33	51,30	38,08	61,40	40,16	29,79	29,53	4,66	12,18	6,74	3,89	19,95
3	Kabupaten	Cianjur	91,11	55,00	29,44	8,89	34,17	52,78	0,00	9,72	13,06	0,00	1,11	4,72
4	Kabupaten	Bandung	35,02	2,50	2,50	34,18	77,14	77,14	20,25	11,79	11,79	10,55	8,57	8,57
5	Kabupaten	Garut	80,88	61,09	60,86	16,67	35,07	35,29	2,45	2,71	2,71	0,00	1,13	1,13
6	Kabupaten	Tasikmalaya	59,26	63,82	48,15	27,64	23,65	39,32	10,54	9,97	9,40	2,56	2,56	3,13
7	Kabupaten	Ciamis	31,70	7,92	19,62	31,70	34,72	41,13	24,53	29,81	15,09	12,08	27,55	24,15
8	Kabupaten	Kuningan	1,33	1,33	1,33	58,78	57,45	56,38	34,57	35,64	36,70	5,32	5,59	5,59
9	Kabupaten	Cirebon	56,40	51,18	51,18	35,07	34,20	34,20	6,40	9,91	9,91	2,13	4,72	4,72
10	Kabupaten	Majalengka	41,98	39,07	39,07	38,19	42,86	42,86	19,24	17,49	17,49	0,58	0,58	0,58
11	Kabupaten	Sumedang	32,85	31,41	31,41	39,71	49,10	49,10	18,05	10,83	10,83	9,39	8,66	8,66
12	Kabupaten	Indramayu	22,71	33,75	60,57	63,41	58,68	36,28	11,99	6,31	2,21	1,89	1,26	0,95
13	Kabupaten	Subang	0,00	0,00	0,00	5,14	26,09	26,09	40,32	44,66	44,66	54,55	29,25	29,25
14	Kabupaten	Purwakarta	69,27	64,58	58,33	27,60	32,29	37,50	2,08	2,08	3,13	1,04	1,04	1,04
15	Kabupaten	Karawang	42,07	27,18	19,09	50,81	65,05	70,23	5,18	5,83	7,77	1,94	1,94	2,91
16	Kabupaten	Bekasi	89,84	87,17	87,17	6,95	10,70	10,70	1,60	1,07	1,07	1,60	1,07	1,07
17	Kabupaten	Bandung Barat	20,00	10,91	7,27	54,55	61,21	52,73	17,58	20,00	30,30	7,88	7,88	9,70
18	Kabupaten	Pangandaran	51,61	43,01	24,73	45,16	53,76	68,82	3,23	3,23	6,45	0,00	0,00	0,00



KABUPATEN/KOTA			PRATAMA			MADYA			PURNAMA			MANDIRI		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
19	Kota	Bogor	20,59	19,12	8,82	66,18	63,24	63,24	13,24	13,24	17,65	0,00	4,41	10,29
20	Kota	Sukabumi	0,00	0,00	0,00	84,85	66,67	66,67	3,03	12,12	12,12	12,12	21,21	21,21
21	Kota	Bandung	64,24	0,66	37,09	25,17	91,39	39,74	6,62	5,30	21,85	3,97	2,65	1,32
22	Kota	Cirebon	18,18	9,09	0,00	50,00	45,45	40,91	22,73	31,82	54,55	9,09	13,64	4,55
23	Kota	Bekasi	75,61	82,14	14,29	24,39	5,36	44,44	0,00	10,71	35,71	0,00	1,79	1,79
24	Kota	Depok	4,08	1,59	7,94	55,10	57,14	49,21	22,45	20,63	20,63	18,37	20,63	22,22
25	Kota	Cimahi	0,00	0,00	0,00	73,33	66,67	66,67	20,00	26,67	26,67	6,67	6,67	6,67
26	Kota	Tasikmalaya	56,52	73,91	73,91	23,19	20,29	20,29	14,49	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
27	Kota	Banjar	0,00	4,00	0,00	32,00	40,00	20,00	60,00	48,00	40,00	8,00	8,00	40,00
PROVINSI			44,75	38,43	36,18	35,29	43,04	45,88	14,00	12,84	15,24	5,95	5,69	7,64

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka % capaian Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri mengalami peningkatan dari 269,22% pada tahun 2019 menjadi 524,27% pada Tahun 2020 hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Indikator Kinerja
Meningkatnya Kelurahan Siaga Aktif Purnama Dan Mandiri
Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		%	Realisasi	
1	Meningkatnya kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	%	8.61	23.18	269.22	9.6	50.33	524.27

Faktor pendorong meningkatnya capaian Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri setiap tahun adalah :

- Kegiatan pembinaan kelurahan siaga aktif baik dari tingkat kota maupun tingkat puskesmas dilaksanakan secara rutin / berkala
- Adanya program inovatif dari Dinas Kesehatan yang bernama Si Cetar (Siaga Covid 19 terintegrasi) yang merupakan wadah untuk penyebarluasan informasi, pembinaan, diskusi dan tanya jawab



seputar kelurahan siaga aktif serta upaya pencegahan Covid 19 yang melibatkan Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, Pengurus RW, Pengurus RW Siaga Aktif secara berkala

- c. Meningkatnya % pembinaan PHBS rumah tangga yang dilakukan terhadap rumah tangga yang ada baik yang dilakukan saat Puskesmas, kader atau lainnya. Terutama saat pandemi covid 19, pembinaan PHBS terus digencarkan baik secara langsung (woro-woro, kunjungan rumah, dll) maupun secara tidak langsung (media sosial, media cetak, media elektronik, dll)

Indeks Keluarga Sehat adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja .

Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 Tingkatan :

- Keluarga Sehat : $> 0,80$
- Keluarga Pra-Sehat : $0,50-0,80$
- Keluarga Tidak Sehat : $< 0,50$

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

1. **Keluarga Mengikuti Program KB** adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
2. **Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan** adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).



3. **Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap** adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
4. **Bayi Mendapat ASI Eksklusif** adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).
5. **Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan** adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badanya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
6. **Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar** adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.
7. **Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur** adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
8. **Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan** adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
9. **Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok** adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.



10. **Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN** adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya
11. **Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih** adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
12. **Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat** adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Cara perhitungannya adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%.

Berdasarkan data Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, IKS Kota Bandung berada pada nilai 0.17 dengan kategori tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 66.490 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di entri ke aplikasi sebanyak 397.862 KK. Angka IKS Kota Bandung masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yaitu 0,14 dimana Jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 1.176.967 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di entri ke aplikasi sebanyak 8.126.802 KK.

Capaian kinerja Indikator Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2020 adalah sebesar 85 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 0,17% , belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,2%



Faktor penghambat tidak tercapainya target ini adalah :

1. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih terbilang program baru sehingga belum dapat diselenggarakan secara optimal. Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020 semakin memperberat kondisi ini, karena Puskesmas tidak dapat melakukan kunjungan lapangan secara optimal.
2. Ditemukan pula permasalahan dari sisi ketenagaan Puskesmas dimana saat ini tenaga kontrak yang melakukan pendataan ke lapangan semakin berkurang jumlahnya sehingga kegiatan PIS-PK menjadi terhambat.
3. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah.
4. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.

Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah :



- a. Meningkatkan cakupan *total coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- b. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur 30.68%, Penderita Gangguan Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan 39.59%, Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok 41.68%);
- d. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- f. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- g. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Adapun data Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.18
Cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	IKS	TINGKATAN KELUARGA SEHAT
1	SUKASARI	0.33	Keluarga Tidak Sehat
2	COBLONG	0.14	Keluarga Tidak Sehat
3	BABAKAN CIPARAY	0.14	Keluarga Tidak Sehat
4	BOJONGLOA KALER	0.06	Keluarga Tidak Sehat
5	ANDIR	0.16	Keluarga Tidak Sehat
6	CICENDO	0.10	Keluarga Tidak Sehat
7	SUKAJADI	0.11	Keluarga Tidak Sehat
8	CIDADAP	0.19	Keluarga Tidak Sehat
9	BANDUNG WETAN	0.09	Keluarga Tidak Sehat



NO	KECAMATAN	IKS	TINGKATAN KELUARGA SEHAT
10	ASTANA ANYAR	0.10	Keluarga Tidak Sehat
11	REGOL	0.13	Keluarga Tidak Sehat
12	BATUNUNGGAL	0.08	Keluarga Tidak Sehat
13	LENGKONG	0.22	Keluarga Tidak Sehat
14	CIBEUNYING KIDUL	0.17	Keluarga Tidak Sehat
15	BANDUNG KULON	0.09	Keluarga Tidak Sehat
16	KIARACONDONG	0.15	Keluarga Tidak Sehat
17	BOJONGLOA KIDUL	0.06	Keluarga Tidak Sehat
18	CIBEUNYING KALER	0.19	Keluarga Tidak Sehat
19	SUMUR BANDUNG	0.10	Keluarga Tidak Sehat
20	ANTAPANI	0.30	Keluarga Tidak Sehat
21	BANDUNG KIDUL	0.14	Keluarga Tidak Sehat
22	BUAH BATU	0.30	Keluarga Tidak Sehat
23	RANCASARI	0.26	Keluarga Tidak Sehat
24	ARCAMANIK	0.27	Keluarga Tidak Sehat
25	CIBIRU	0.20	Keluarga Tidak Sehat
26	UJUNGBERUNG	0.21	Keluarga Tidak Sehat
27	GEDEBAGE	0.24	Keluarga Tidak Sehat
28	PANYILEUKAN	0.30	Keluarga Tidak Sehat
29	CINAMBO	0.19	Keluarga Tidak Sehat
30	MANDALAJATI	0.19	Keluarga Tidak Sehat
	KOTA BANDUNG	0.17	Keluarga Tidak Sehat

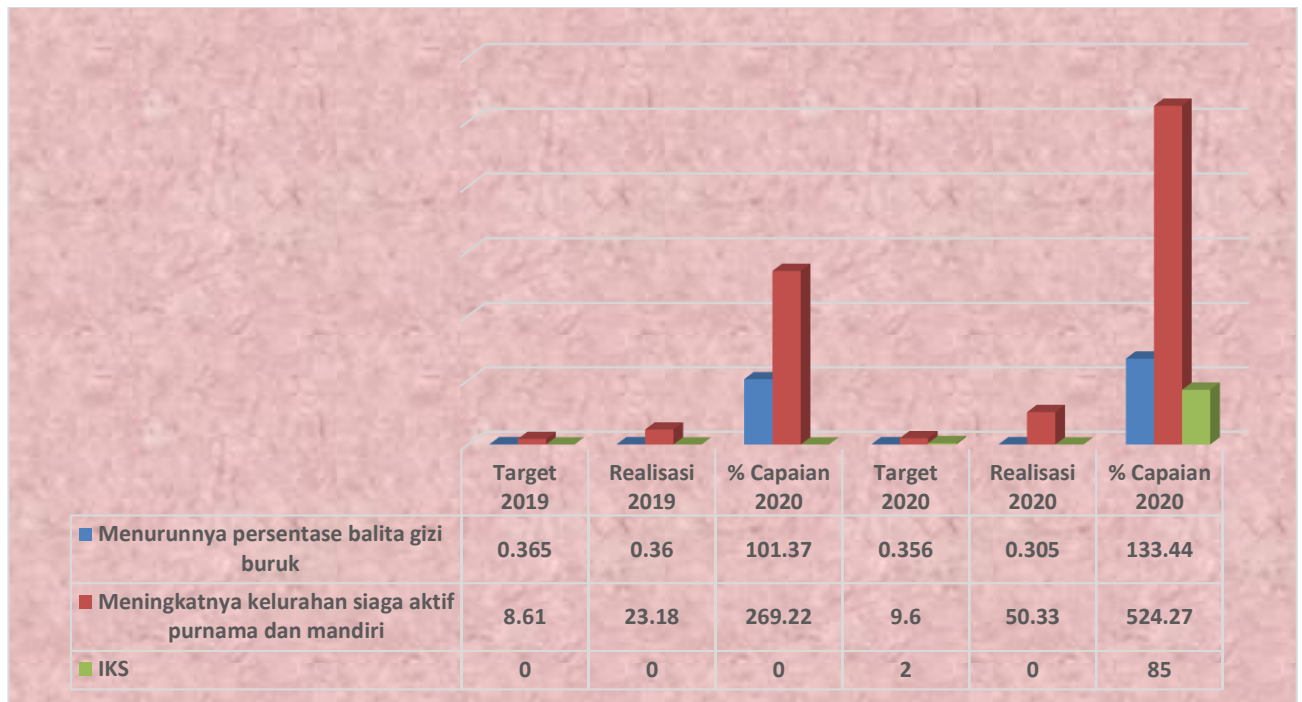
Jika melihat cakupan IKS Perkecamatan di Kota Bandung Tahun 2020 pada table di atas , maka tingkatan keluarga sehat di kota Bandung masuk dalam kriteria Keluarga Tidak Sehat.

Indikator Keluarga Sehat merupakan indicator baru di tahun 2020 sehingga capaian kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Perbandingan realisasi Indikator sasaran 2 antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Hidup Sehat
Tahun 2019 dan Tahun 2020



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa % capaian Indikator Sasaran 2 untuk Indikator Menurunnya persentase balita gizi buruk pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 32.07%. Indikator Meningkatnya kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 255.06%, Sedangkan untuk indikator IKS pada tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 IKS belum menjadi indikator

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 2 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana telah direncanakan dalam target akhir Renstra adalah sebagai berikut :



Tabel 3.19
Pencapaian Indikator Sasaran 2
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Menurunnya persentase balita gizi buruk	%	0.305	0.325	113.11	0.02
2	Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	%	50.33	21.19	237.52	29.14
3	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.17	0.28	60.71	0.11

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran 2 pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 indikator : 2 indikator (66.67%) sudah melebihi target target , dan 1 indikator (33.3%) belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2023.

Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung sifatnya sangat spesifik disesuaikan dengan tugas fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung , permasalahan dan isu-isu strategis di Kota Bandung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih , hal ini menyebabkan indikator yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu indikator Menurunnya persentase balita gizi buruk, Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri dan Indeks Keluarga Sehat , berbeda dengan instansi lain sehingga tidak dapat dibandingkan kinerjanya.



Program yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 2 ada sebanyak 2 program dimana program ini memiliki indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 3.20
Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran 2 :
Meningkatnya Budaya Hidup Sehat

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pengetahuan hidup sehat	Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	Jumlah kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri dibagi jumlah kelurahan siaga aktif dikali 100% . Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1529/menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	persentase	9,6%	50,33%	524%
	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga Sehat dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga dikali 100% Berdasarkan Permenkes no 2269/menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	persentase	67,90%	61,83%	91.06
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk hidup sehat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan dibagi jumlah seluruh masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	persentase	100	100	100

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indicator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase yaitu Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri sebesar 50,33% telah melebihi dari target yang ditetapkan 50,33%, hal ini karena adanya faktor pendorong sebagai berikut : a.Peningkatan peran serta aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan kelurahan siaga aktif, b.Meningkatnya dukungan Camat dan Lurah dalam pembuatan peraturan ataupun koordinasi dengan sektor kesehatan untuk kegiatan kelurahan siaga aktif dan c.Meningkatnya dukungan dana dari



masyarakat dan dunia usaha terutama untuk penanggulangan Siaga Covid 19. Sedangkan untuk indikator Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga sebesar 61,83% belum sesuai dengan target yang ditetapkan 67,90%, hal ini disebabkan karena Kriteria suatu rumah tangga dapat dikatakan Sehat apabila dari 12 indikator yang ada semuanya sesuai kriteria, namun pada kenyataannya masih ada rumah tangga yang belum memenuhi 12 indikator tersebut dan indikator yang paling banyak belum terpenuhi adalah indikator tidak adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

Adapun Pencapaian dari indikator kinerja Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat sebanyak 1 indikator semuanya telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% , hal ini dikarenakan adanya dukungan data yang tepat.

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 2 ini adalah 4 kegiatan dan memiliki 8 indikator kinerja kegiatan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran 2 :
Meningkatnya Budaya Hidup Sehat

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Satuan	Target	Realisasi
Terlaksananya Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Fasyankes	125	125	100
		Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat	Dokumen	6	6	100
		Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKIA	orang	7700	7700	100
		Jumlah masyarakat (individu) yang	orang	1.452	1.452	100



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Satuan	Target	Realisasi
		mendapatkan penyuluhan di RSKGM				
		Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSUD	Orang	1150	1150	100
	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan (DAK)	Jumlah Media cetak	Jenis	3	3	100
		Jumlah dokumen kegiatan	Dokumen	1	1	100
Tersedianya jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Orang	410201	413603	100.82

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indikator kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan (bersumber APBD dan APBN) sebanyak 7 indikator, semuanya (100%) telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Ketercapaian target ini adalah karena a. Perencanaan telah sesuai dengan pelaksanaan serta di dukung oleh SDM promkes di seksi promkes dan PM, Puskesmas dan RS, b. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara individu kepada pasien dengan menerapkan protokol kesehatan pada Adaptasi Kebiasaan Baru dengan tidak adanya kerumunan kegiatan tersebut.

Untuk Indikator Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebanyak 1 indikator, semuanya (100%) telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%.



Adapun dokumentasi kegiatan yang terkait dengan indicator Sasaran 2 yaitu adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Promosi Kesehatan



b. Pertemuan Pembinaan PHBS dan Program Kesehatan



c. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27





Bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran 2 maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.22
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PENCAPAIAN SASARAN 2
TAHUN 2020

No	Sasaran 2	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2020			Efisiensi
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	%	
1	Menurunnya persentase balita gizi buruk	%	0.356	0.305	133.44	167,669,075,660.00	156,050,690,947.00	93.07	154,5%
2	Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	%	9.6	50.33	524.27				
3	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2	0.17	85				
		JUMLAH			247.57	167,669,075,660.00	156,050,690,947.00	93.07	154,5%

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 2 adalah sebesar 247,57 % , sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 93,07 % sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 1 adalah sebesar 154,5% (247,57 90 % - 93.07%) .



B.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan

Jumlah sasaran 3 yang diukur kinerjanya 3 indikator. Sebanyak 3 (100%) indikator sudah melebihi target, hal ini dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 3 :
Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	per 100.000 kelahiran hidup	71.70	69.03	107.74
2	Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	per 1000 kelahiran hidup	2.75	2.02	172.07
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	79	84.19	106.57

Untuk melihat resiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri.

Angka kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

Cara perhitungannya adalah Jumlah kematian ibu dikali 100.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun



Capaian Indikator kinerja Angka kematian Ibu pada tahun 2020 adalah sebesar 107.14% dengan capaian kinerja nyata sebesar 69,03 dibawah target yang ditetapkan yaitu 71.70.

Faktor yang mendorong tercapainya target adalah sebagai berikut ;

1. Pendistribusian Buku KIA tahun 2020 telah mencakup semua sasaran ibu hamil di Kota Bandung sehingga pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor dapat digunakan secara optimal dalam pemantuan kesehatan pada ibu hamil. Dengan terdistribusinya buku KIA maka kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas dapat dikenali sedini mungkin sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan kasus komplikasi.
2. Peningkatan pelayanan di fasilitas Kesehatan Kota Bandung melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi dokter umum. Hal ini dapat menekan kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan upaya skrining faktor resiko.
3. Sebagian besar ibu hamil, bersalin dan nifas di Kota Bandung telah memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pelayanan kesehatan ibu hamil,bersalin dan nifas.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka jumlah kematian ibu pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 29 menjadi 28 kasus.



Adapun Penyebab kematian ibu terbanyak setiap triwulan adalah seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.24
Penyebab Kematian Ibu
Triwulan I, II, III dan IV
Tahun 2020



NO.	PENYEBAB KEMATIAN IBU	JUMLAH TW 1	%	JUMLAH TW 2	%	JUMLAH TW 3	%	JUMLAH	%	KET
1.	Perdarahan	2	50	4	33,3	5	31,3	12	42,9	
2.	Lain-lain	-	-	3	25	3	18,8	7	25,0	
3.	Gangguan sistem perdarahan (Jantung, Stroke)	-	-	2	16,7	2	12,5	2	7,1	
4.	Infeksi	2	50	2	16,7	3	18,8	4	14,3	
5.	Hipertensi dalam kehamilan			1	8,3	3	18,8	3	10,7	
Jumlah		4	100	12	100	16	100	28	100	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu tertinggi pada adalah pendarahan sebanyak 12 kasus. Jika dibandingkan dengan triwulan III untuk penyebab kematian karena pendarahan, lain-lain dan infeksi mengalami peningkatan.



Adapun sebaran kematian ibu per kecamatan pada triwulan I sampai dengan tahun 2020 adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.25
Sebaran Kematian Ibu Per Kecamatan
Triwulan I, II, III dan IV
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS		JUMLAH KEMATIAN IBU TW I	JUMLAH KEMATIAN IBU TW II	JUMLAH KEMATIAN IBU TW III	JUMLAH KEMATIAN IBU TW IV	KET
1	SUKARASA	1	Sukasasa	-	-	-	-	
		2	Ledeng	-	-	-	-	
		3	Karangsetra	1	1	1	1	
		4	Sarijadi	-	-	-	-	
2	SUKAJADI	5	Sukajadi	-	-	-	1	
		6	Sukawarna	-	-	-	-	
		7	Sukagalih	-	-	-	-	
3	CICENDO	8	Pasirkaliki	-	-	-	-	
		9	Sukaraja	-	-	-	-	
4	ANDIR	10	Garuda	-	1	2	3	
		11	Babatan	-	-	-	-	
5	CIDADAP	12	Ciumbuleuit	-	-	-	-	
		13	Cipaku	-	-	-	-	
6	COBLONG	14	Puter	-	-	-	-	
		15	Dago	3	3	4	5	
		16	Cikutra Lama	-	-	-	-	
		17	Sekeloa	-	-	-	-	
7	BANDUNG WETAN	18	Salam	-	-	-	-	
		19	Tamansari	-	-	-	-	
8	SUMUR BANDUNG	20	Tamblong	-	-	-	-	
		21	Balaikota	-	-	-	-	
9	CIBEUNYING KALER	22	Neglasari	-	-	-	-	
		23	Cigadung	-	-	-	-	
10	CIBEUNYING KIDUL	24	Padasuka	-	-	1	2	
		25	Pasirlayung	-	1	1	1	
11	KIARACONDONG	26	Babakan Sari	-	1	1	1	
		27	Babakan Surabaya	-	-	-	1	
12	BATUNUNGGAL	28	Ibrahim Adjie	-	-	-	1	



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN IBU TW I	JUMLAH KEMATIAN IBU TW II	JUMLAH KEMATIAN IBU TW III	JUMLAH KEMATIAN IBU TW IV	KET	
		29	Gumuruh	-	-	-	-	
		30	Ahmad Yani	-	-	-	-	
13	LENGKONG	31	Talagabodas	-	-	-	-	
		32	Suryalaya	-	-	-	-	
		33	Cijagra Baru	-	-	-	-	
		34	Cijagra Lama	-	-	-	-	
14	REGOL	35	Pasundan	-	-	-	-	
		36	M. Ramdhan	-	-	-	-	
		37	Pasirluyu	-	-	-	-	
15	ASTANA ANYAR	38	Pagarsih	-	1	1	1	
		39	Astana Anyar	-	-	-	-	
		40	Lio Genteng	-	-	-	2	↑
		41	Pelindung Hewan	-	-	-	-	
16	BOJONGLOA KALER	42	Citarip	-	-	-	-	
		43	Sukapakir	-	-	-	-	
		44	Babakan Tarogong	-	-	-	-	
17	BOJONGLOA KIDUL	45	Kopo	-	1	1	2	↑
		46	Cibaduyut Wetan	-	-	-	-	
		47	Cibaduyut Kidul	-	-	-	-	
18	BABAKAN CIPARAY	48	Caringin	-	-	-	-	
		49	Cibolerang	-	-	-	-	
		50	Sukahaji	-	-	-	-	
19	BANDUNG KULON	51	Cibuntu	-	-	-	-	
		52	Cijerah	-	-	-	-	
		53	Cigondewah	-	-	-	-	
20	ANTAPANI	54	Griya Antapani	-	-	1	1	
		55	Jajaway	-	-	-	-	
		56	Antapani	-	-	-	-	
21	MANDALAJATI	57	Sindangjaya	-	-	-	1	↑
		58	Pamulang	-	-	-	-	
		59	Girimande	-	-	-	-	
		60	Jatihandap	-	-	-	-	
		61	Mandalamekar	-	-	-	-	
22	ARCAMANIK	62	Arcamanik	-	-	-	1	↑
		63	Rusunawa	-	-	-	-	



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS		JUMLAH KEMATIAN IBU TW I	JUMLAH KEMATIAN IBU TW II	JUMLAH KEMATIAN IBU TW III	JUMLAH KEMATIAN IBU TW IV	KET
23	UJUNGBERUNG	64	Ujungberung Indah	-	1	1	2	↑
		65	Pasir Jati	-	-	-	-	
24	CINAMBO	66	Cinambo	-	-	-	-	
25	CIBIRU	67	Cibiru	-	-	-	-	
		68	Cilengkrang	-	-	-	-	
		69	Cipadung	-	-	-	-	
26	PANYILEUKAN	70	Panghegar	-	-	-	-	
		71	Panyileukan	-	-	-	-	
27	GEDEBAGE	72	Riung Bandung	-	1	1	1	
		73	Cempaka Arum	-	-	-	-	
28	RANCASARI	74	Cipamokolan	-	1	1	1	
		75	Derwati	-	-	-	-	
29	BUAHBATU	76	Margahayu Raya	-	-	-	-	
		77	Sekejati	-	-	-	-	
30	BANDUNG KIDUL	78	Kujangsari	-	-	-	-	
		79	Mengger	-	-	-	-	
		80	Pasawahan	-	-	-	-	
TOTAL				4	12	16	28	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah kematian ibu terbanyak adalah Kecamatan Coblong sebanyak 5 kasus. Jika dibandingkan dengan Triwulan III, maka untuk Kecamatan Astana Anyar (UPT PKM Liogenteng), Kecamatan Bojongloa Kidul (UPT PKM Kopo), Kecamatan Mandalajati (UPT PKM Sindangjaya), Kecamatan Arcamanik (UPT PKM Arcamanik) dan Kecamatan Ujung berung (UPT PKM Ujung Berung Indah) mengalami peningkatan kasus kematian ibu.

Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi.



Angka Kematian Bayi Adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara Perhitungannya adalah Jumlah kematian bayi usia 0 - 1 tahun dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun.

Capaian kinerja angka kematian bayi pada tahun 2020 adalah sebesar 172.77 % % dengan capaian kinerja nyata sebesar 2.02 orang kurang dari target yang ditetapkan yaitu 2,75 .Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika realisasinya ada dibawah target.

Faktor pendorong tercapainya target ini adalah :

1. Penguatan pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui peningkatan risiko komplikasi maupun tanda bahaya pada bayi serta dapat segera mengambil keputusan untuk dilakukan penanganan yang tepat dan cepat apabila terjadi kegawatdaruratan.
2. Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung, baik penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menangani kegawatdaruratan perinatal maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada bayi melalui pelatihan serta orientasi pelayanan penanganan pra rujukan, penanganan kegawatdaruratan dan komplikasi.
3. Kota Bandung telah memfasilitasi penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, termasuk bayi. Hal ini diharapkan dapat



membantu keluarga dalam mengambil keputusan dengan cepat saat terjadi kegawatdaruratan maupun komplikasi pada bayi.

4. Perbaiki sistem pelaporan kematian di tingkat Rumah Sakit dan Klinik, sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian bayi sudah baik.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka jumlah kematian bayi tahun 2020 mengalami penurunan dari 114 menjadi 82 balita.

Adapun penyebab kematian bayi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Penyebab Kematian Bayi
Triwulan I s.d IV Tahun 2020

No	Penyebab Kematian	Jumlah TW I	%	Jumlah TW II	%	Jumlah TW III	%	Jumlah TW IV	%	KET
1	BBLR	7	26,9	9	24,3	14	25,9	19	23,2	
2	Lain-lain	2	7,7	8	21,6	10	18,5	21	25,6	
3	Asfiksia	3	11,5	3	8,1	6	11,1	11	13,4	
4	Diare	3	11,5	3	8,1	3	5,6	4	4,9	
5	Kelainan Bawaan	1	3,8	3	8,1	5	9,3	8	9,8	
6	Demam	2	7,7	2	5,4	3	5,6	3	3,7	
7	Dehidrasi	2	7,7	2	5,4	2	3,7	2	2,4	
8	Sepsis	2	7,7	2	5,4	4	7,4	4	4,9	
9	Pneumonia	1	3,8	2	5,4	3	5,6	6	7,3	
10	Aspirasi Air Ketuban	1	3,8	1	2,7	1	1,9	1	1,2	
11	Aspirasi ASI	1	3,8	1	2,7	2	3,7	2	2,4	
12	Aspirasi Susu Formula	1	3,8	1	2,7	1	1,9	1	1,2	
Jumlah		26	100	37	100	54	100,0	82	100,0	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebab kematian pada bayi terbesar adalah lain-lain sebesar 21 kasus (25,5%) BBLR sebesar 19 kasus (24,3 %). Jika dibandingkan dengan triwulan III untuk penyebab kematian BBLR, lain-lain, Asfiksia, Diare, kelainan bawaan, pneumonia mengalami peningkatan.



Adapun sebaran kematian bayi per kecamatan pada Triwulan I s.d IV tahun 2020 adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.27
Sebaran Kematian Bayi Per Kecamatan
Triwulan I s.d IV Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN I	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN II	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN III	JUMLAH KEMATIAN BAYI	KET	
1	SUKARASA	1	Sukarasa	-	-	-	-	
		2	Ledeng	-	-	-	-	
		3	Karangsetra	-	-	-	-	
		4	Sarijadi	-	-	-	-	
2	SUKAJADI	5	Sukajadi	5	5	5	10	↑
		6	Sukawarna	-	-	-	-	
		7	Sukagalih	-	-	-	-	
3	CICENDO	8	Pasirkaliki	-	-	-	-	
		9	Sukaraja	1	1	1	1	
4	ANDIR	10	Garuda	-	1	4	5	↑
		11	Babatan	1	1	1	1	
5	CIDADAP	12	Ciumbuleuit	-	-	2	2	
		13	Cipaku	-	-	1	1	
6	COBLONG	14	Puter	1	1	1	3	↑
		15	Dago	1	2	3	4	↑
		16	Cikutra Lama	1	1	1	2	↑
		17	Sekeloa	-	-	-	-	
7	BANDUNG WETAN	18	Salam	-	-	-	-	
		19	Tamansari	-	1	1	1	
8	SUMUR BANDUNG	20	Tamblong	2	2	4	4	↑
		21	Balaikota	-	-	-	-	
9	CIBEUNYING KALER	22	Neglasari	-	-	-	-	
		23	Cigadung	-	-	-	-	
10	CIBEUNYING KIDUL	24	Padasuka	-	-	-	2	↑
		25	Pasirlayung	-	-	-	-	
11	KIARACONDONG	26	Babakan Sari	-	3	3	4	↑
		27	Babakan Surabaya	-	-	-	-	
12	BATUNUNGGAL	28	Ibrahim Adjie	1	1	2	3	↑
		29	Gumuruh	-	-	-	-	
		30	Ahmad Yani	-	-	-	-	



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN I	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN II	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN III	JUMLAH KEMATIAN BAYI	KET	
13	LENGKONG	31	Talagabodas	-	-	-	-	
		32	Suryalaya	-	-	-	-	
		33	Cijagra Baru	-	-	-	-	
		34	Cijagra Lama	1	1	1	1	
14	REGOL	35	Pasundan	-	-	-	-	
		36	M. Ramdhan	-	-	-	-	
		37	Pasirluyu	-	-	-	-	
15	ASTANA ANYAR	38	Pagarsih	-	-	-	-	
		39	Astana Anyar	-	-	-	-	
		40	Lio Genteng	-	-	-	-	
		41	Pelindung Hewan	-	-	-	-	
16	BOJONGLOA KALER	42	Citarip	-	1	1	1	
		43	Sukapakir	-	-	-	1	↑
		44	Babakan Tarogong	-	-	-	-	
17	BOJONGLOA KIDUL	45	Kopo	-	-	-	-	
		46	Cibaduyut Wetan	1	2	2	2	
		47	Cibaduyut Kidul	-	-	-	-	
18	BABAKAN CIPARAY	48	Caringin	1	2	2	2	
		49	Cibolerang	-	-	-	-	
		50	Sukahaji	-	-	-	-	
19	BANDUNG KULON	51	Cibuntu	3	3	4	6	↑
		52	Cijerah	-	-	-	1	
		53	Cigondewah	-	-	-	-	
20	ANTAPANI	54	Griya Antapani	-	-	1	1	
		55	Jaway	-	-	-	-	
		56	Antapani	-	-	-	-	
21	MANDALAJATI	57	Sindangjaya	-	-	1	1	
		58	Pamulang	-	-	-	-	
		59	Girimande	-	-	1	1	
		60	Jatihandap	-	1	1	1	
		61	Mandalamekar	-	-	-	3	↑
22	ARCAMANIK	62	Arcamanik	1	1	1	2	↑
		63	Rusunawa	-	-	-	-	
23	UJUNGBERUNG	64	Ujungberung Indah	1	1	1	1	
		65	Pasir Jati	1	1	1	1	



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN I	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN II	JUMLAH KEMATIAN BAYI TRIWULAN III	JUMLAH KEMATIAN BAYI	KET
24	CINAMBO	66 Cinambo	-	-	1	1	
25	CIBIRU	67 Cibiru	1	1	1	1	
		68 Cilengkrang	-	-	-	-	
		69 Cipadung	-	-	-	-	
26	PANYILEUKAN	70 Panghegar	-	-	-	1	↑
		71 Panyileukan	-	-	-	-	
27	GEDEBAGE	72 Riung Bandung	2	2	2	3	↑
		73 Cempaka Arum	-	-	-	-	
28	RANCASARI	74 Cipamokolan	-	-	-	1	↑
		75 Derwati	-	-	-	1	↑
29	BUAHBATU	76 Margahayu Raya		-	-	-	
		77 Sekejati		1	1	1	
30	BANDUNG KIDUL	78 Kujangsari		-	1	4	↑
		79 Mengger	1	1	1	1	
		80 Pasawahan		-	-	-	
TOTAL			26	37	54	82	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah kematian ibu terbanyak adalah Kecamatan Sukajadi sebanyak 10 kasus (12,20%) . Jika dibandingkan dengan triwulan III maka ada 18 kecamatan yang mengalami peningkatan kasus kematian bayi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.



Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam Permenpan No 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran

1. Mendukung partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Adapun Manfaat dilakukannya SKM antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat



4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat, dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sasaran yang diindikasikan dengan tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai IKM dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dari sejumlah pernyataan ukuran pelayanan publik yang diberikan kepada sejumlah responden yang berkunjung ke puskesmas dalam periode tertentu

Cara perhitungannya adalah : Jumlah rata rata indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap kinerja pelayanan yang diberikan pada satu Puskesmas dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas dikali 100%.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, terdiri dari 9 unsur :

- i. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif



- ii. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
- iii. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- iv. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
- v. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
- vi. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
- vii. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
- viii. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut**
- ix. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



Tujuan dari dilakukannya survey kepuasan di masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan di 80 UPT Puskesmas.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan di 80 UPT Puskesmas
3. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada di 80 UPT Puskesmas.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang ada di 80 UPT Puskesmas
5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di 80 UPT Puskesmas dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil analisis data Laporan IKM 80 UPT Puskesmas yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung dari 9 unsur yang dinilai yaitu : Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, Kecepatan tugas, Kemampuan tugas, Kesopanan dan keramahan, Kenyamanan unit kerja Kewajaran biaya, Keadilan pelayanan, dan Keamanan unit pelayanan didapatkan hasil pada table sebagai berikut :



Tabel 3.28
ANALISIS DATA LAPORAN IKM
BERDASARKAN DATA TIAP UNSUR PELAYANAN
Tahun 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	UPT Puskesmas Cibuntu	3,40	3,36	3,22	3,36	3,30	3,38	3,41	3,19	3,26
2	UPT Puskesmas Cijerah	3,36	3,29	3,32	3,59	3,32	3,30	3,31	3,26	3,31
3	UPT Puskesmas Cigondewah	3,54	3,38	3,11	3,67	3,68	3,15	3,27	3,01	3,34
4	UPT Puskesmas Caringin	3,33	3,28	3,27	3,34	3,24	3,34	3,32	3,34	3,65
5	UPT Puskesmas Sukahaji	3,19	3,21	3,23	3,49	3,33	3,43	3,22	3,19	3,64
6	UPT Puskesmas Cibolerang	3,30	3,46	3,32	3,60	3,39	3,43	3,32	3,02	3,73
7	UPT Puskesmas Suka pakir	3,39	3,38	3,41	3,46	3,35	3,69	3,22	3,30	3,31
8	UPT Puskesmas Citarip	3,25	3,26	3,04	3,53	3,23	3,31	3,35	3,30	3,74
9	UPT Puskesmas Kopo	3,34	3,31	3,2	3,40	3,28	3,23	3,31	3,24	3,65
10	UPT Puskesmas Pagarsih	3,33	3,37	3,24	3,24	3,309	3,50	3,39	3,35	3,50
11	UPT Puskesmas Lio Genteng	3,29	3,29	3,24	3,31	3,28	3,30	3,29	3,29	3,58
12	UPT Puskesmas Pelindung Hewan	3,25	3,17	3,43	3,43	3,06	3,48	3,12	3,47	3,60
13	UPT Puskesmas Astana anyar	3,40	3,31	3,36	3,34	3,35	3,36	3,32	3,21	3,63
14	UPT Puskesmas Pasundan	3,38	3,36	3,14	3,36	3,30	3,35	3,36	3,21	3,71
15	UPT Puskesmas Moh. Ramdhan	3,36	3,35	3,27	3,38	3,33	3,34	3,35	3,34	3,30
16	UPT Puskesmas Pasirluyu	3,28	3,36	3,20	3,80	3,22	3,32	3,28	3,28	3,28
17	UPT Puskesmas Talagabodas	3,58	3,46	3,60	3,51	3,40	3,54	3,48	3,42	3,46
18	UPT Puskesmas Suryalaya	3,34	3,39	3,29	3,79	3,28	3,40	3,62	3,28	3,10
19	UPT Puskesmas Cijagra lama	3,36	3,44	3,40	3,35	3,36	3,40	3,37	3,40	3,34
20	UPT Puskesmas Cijagra baru	3,52	3,47	3,29	3,54	3,31	3,40	3,40	2,87	3,46
21	UPT Puskesmas Pasawahan	3,18	3,66	3,64	3,60	3,07	3,48	3,49	2,99	3,10
22	UPT Puskesmas Mengger	3,27	3,33	3,16	3,29	3,21	3,30	3,50	3,20	3,89
23	UPT Puskesmas Kujangsari	3,34	3,13	3,87	3,55	3,64	3,21	3,23	3,39	3,45



NO	NAMA PUSKESMAS	UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
24	UPT Puskesmas Margahayu raya	3,38	3,40	3,13	3,52	3,47	3,38	3,19	3,46	4,40
25	UPT Puskesmas Sekejati	3,40	3,44	3,31	3,54	3,35	3,45	3,32	3,58	3,51
26	UPT Puskesmas Derwati	3,43	3,43	3,32	3,32	3,39	3,26	3,43	3,32	3,28
27	UPT Puskesmas Cipamokolan	3,53	3,50	3,10	3,35	3,28	3,28	3,29	3,00	3,59
28	UPT Puskesmas Riung Bandung	3,22	3,28	3,21	3,48	3,27	3,37	3,38	3,31	3,39
29	UPT Puskesmas Cempaka arum	3,96	3,77	3,67	3,67	3,65	3,65	4,00	3,77	3,65
30	UPT Puskesmas Cilengkrang	3,33	3,34	3,33	3,34	3,32	3,48	3,33	3,22	3,42
31	UPT Puskesmas Cibiru	3,41	3,36	3,20	3,47	3,42	3,32	3,35	3,31	3,10
32	UPT Puskesmas Cipadung	3,45	3,41	3,23	3,34	3,28	3,31	3,40	3,25	3,25
33	UPT Puskesmas Panyileukan	3,30	3,30	3,20	3,40	3,4	3,3	3,3	3,2	3,8
34	UPT Puskesmas Panghegar	3,28	3,27	3,36	3,36	3,33	3,38	3,38	3,25	3,32
35	UPT Puskesmas Cinambo	3,38	3,37	3,35	3,36	3,42	3,47	3,42	3,09	3,31
36	UPT Puskesmas Ujung berung Indah	3,24	3,32	3,24	3,39	3,39	3,29	3,31	3,3	3,48
37	UPT Puskesmas Arcamanik	3,44	3,43	3,19	3,46	3,39	3,44	3,49	3,32	3,58
38	UPT Puskesmas Sindang jaya	2,99	2,96	2,9	2,88	3,01	3,01	3,02	3,03	2,95
39	UPT Puskesmas Rusunawa	3,32	3,23	3,18	3,36	3,18	3,43	3,36	3,09	3,78
40	UPT Puskesmas Griya Antapani	3,33	3,38	3,24	3,49	3,30	3,37	3,37	3,33	3,44
41	UPT Puskesmas Antapani	3,47	3,44	3,41	3,47	3,44	3,43	3,40	3,43	3,55
42	UPT Puskesmas Jajawai	3,25	3,36	3,14	3,25	3,21	3,25	3,25	3,32	3,54
43	UPT Puskesmas Mandala Mekar	3,34	3,2	3,08	3,32	3,3	3,26	3,56	2,96	3,24
44	UPT Puskesmas Pamulang	3,34	3,29	3,30	3,37	3,29	3,29	3,26	3,40	3,34
45	UPT Puskesmas Girimande	3,24	3,30	3,26	3,48	3,32	3,38	3,58	3,21	3,65
46	UPT Puskesmas Babakan sari	3,54	3,55	3,39	3,59	3,55	3,55	3,58	3,37	3,54
47	UPT Puskesmas Babakan Surabaya	3,40	3,20	2,90	3,60	3,20	3,50	3,50	3,40	3,50
48	UPT Puskesmas Ahmad yani	3,32	3,30	3,24	3,44	3,31	3,22	3,25	3,29	3,44
49	UPT Puskesmas Gumuruh	3,41	3,43	3,18	3,74	3,74	3,28	3,61	3,18	3,29



NO	NAMA PUSKESMAS	UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
50	UPT Puskesmas Ibrahim Adjie	3,57	3,78	3,62	3,60	3,57	3,57	3,59	3,46	3,68
51	UPT Puskesmas Tamblong	3,36	3,30	3,01	3,31	3,30	3,33	3,41	3,29	3,60
52	UPT Puskesmas Balaikota	3,37	3,35	3,31	3,50	3,45	3,49	3,46	3,15	3,01
53	UPT Puskesmas Babatan	3,52	3,37	3,34	3,36	3,42	3,41	3,28	3,43	3,47
54	UPT Puskesmas Garuda	3,52	3,55	3,37	3,58	3,48	3,58	3,57	3,51	3,70
55	UPT Puskesmas Pasirkaliki	3,33	3,40	3,13	3,26	3,33	3,40	3,60	3,46	3,66
56	UPT Puskesmas Salam	3,43	3,38	3,39	3,32	3,31	3,37	3,38	3,30	3,32
57	UPT Puskesmas Taman sari	3,35	3,35	3,18	3,35	3,39	3,39	3,51	3,14	3,67
58	UPT Puskesmas Padasuka	4,00	3,15	3,11	3,50	3,70	3,21	3,15	3,21	3,70
59	UPT Puskesmas Pasirlayung	4,84	4,88	4,24	4,93	4,64	4,33	4,36	4,13	3,25
60	UPT Puskesmas Jatihandap	4,00	4,00	3,00	4,00	3,10	3,10	3,20	2,40	3,20
61	UPT Puskesmas Cikutra lama	3,51	3,54	3,49	3,41	3,45	3,52	3,61	3,28	3,56
62	UPT Puskesmas Neglasari	3,29	3,28	3,17	3,45	3,26	3,51	3,33	3,38	3,60
63	UPT Puskesmas Dago	3,27	3,33	3,24	3,31	3,29	3,37	3,36	3,28	3,61
64	UPT Puskesmas Puter	3,44	3,52	3,44	3,74	3,56	3,44	3,37	3,35	3,36
65	UPT Puskesmas Sekeloa	3,20	3,26	3,32	3,38	3,33	3,38	3,30	3,34	3,40
66	UPT Puskesmas Sukawarna	3,20	2,80	3,20	3,20	3,10	3,30	3,40	3,40	3,40
67	UPT Puskesmas Sukajadi	3,41	3,39	3,24	3,47	3,33	3,40	3,39	3,23	3,78
68	UPT Puskesmas Karangstra	3,43	3,42	3,36	3,15	3,32	3,38	3,42	3,28	3,44
69	UPT Puskesmas Ledeng	3,48	3,40	3,39	3,51	3,42	3,42	3,42	3,49	3,41
70	UPT Puskesmas Sukarasa	3,29	3,34	3,30	3,30	3,20	3,25	3,33	3,25	3,53
71	UPT Puskesmas Sarijadi	3,40	3,40	3,30	3,30	3,50	3,30	3,40	3,20	3,60
72	UPT Puskesmas Cipaku	3,26	3,31	3,37	3,33	3,45	3,40	3,36	3,43	3,44
73	UPT Puskesmas Ciumbuleuit	3,28	3,20	3,28	3,08	3,34	3,41	3,36	3,44	3,56
74	UPT Puskesmas Sukaraja	3,24	3,52	3,08	3,44	3,12	3,40	3,40	3,52	3,72
75	UPT Puskesmas Cigadung	3,24	3,24	3,37	3,22	3,23	3,36	3,38	3,33	3,61



NO	NAMA PUSKESMAS	UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
76	UPT Puskesmas Pasirjati	3,50	4,42	3,38	3,48	3,42	3,24	3,26	3,11	3,14
77	UPT Puskesmas Sukagalih	3,36	3,38	3,26	3,42	3,39	3,48	3,67	2,99	3,50
78	UPT Puskesmas Cibaduyut kidul	3,53	3,51	3,42	3,58	3,47	3,61	3,68	3,38	3,98
79	UPT Puskesmas Cibaduyut wetan	3,43	3,48	3,44	3,51	3,33	3,32	3,44	3,10	2,86
80	UPT Puskesmas Babakan tarogong	3,13	3,21	3,01	3,42	3,11	3,20	3,32	3,07	3,56
	Jumlah	271,70	271,68	262,79	276,2	268,48	270,76	271,86	262,58	278,55
	Rata-rata	3,40	3,40	3,28	3,45	3,36	3,38	3,40	3,28	3,48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa **unsur yang tertinggi** dari kepuasan masyarakat adalah tentang Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang disediakan di Puskesmas. Hal ini berarti masyarakat puas dengan adanya sarana pengaduan yang disediakan di Puskesmas, karena mereka merasa keluhan atau ketidak puasan mereka atas pelayanan yang diberikan ada sarannya.

Adapun Unsur yang terendah dalam survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Waktu penyelesaian adalah* jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Masyarakat belum merasa puas dengan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas Puskesmas.
2. *Sarana dan prasarana adalah* **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Hal ini terjadi karena tidak



semua Puskesmas memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk Mendorong agar Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik , maka dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan pengelolaan data keluhan dari Masyarakat. Dibawah ini adalah rincian pengelolaan data keluhan masyarakat :

Tabel 3.29
Pengelolaan Data Keluhan Masyarakat Tahun 2020

NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
1	UPT Puskesmas Cibuntu	1. Keterbatasan lahan parkir kendaraan pengunjung	1. Semua keluhan pasien yang masuk melalui kotak saran di Puskesmas kelola oleh Puskesmas sesuai kemampuan, seperti : kurangnya lahan parkir, ruang tunggu yang kurang luas dan kurangnya kursi tunggu pasien bisa dipenuhi dari dana BLUD UPT Puskesmas induk awal yang sudah BLUD 2. Untuk keluhan yang tidak dapat dikelola oleh Puskesmas Akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, seperti kekurangan SDM (bila sudah tidak bisa diupayakan dengan pengaturan Job description) , alat alat kesehatan yang tidak sanggup dibeli oleh Puskesmas dan juga bangunan/gedung Puskesmas (relokasi, renovasi dan penambahan ruangan pelayanan) 3. Untuk keluhan yang tidak dapat dikelola oleh Puskesmas Akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, seperti kekurangan SDM (bila sudah tidak bisa diupayakan dengan pengaturan Job description) , alat alat kesehatan yang tidak sanggup dibeli oleh Puskesmas 4. Untuk keluhan kualitas kompetensi petugas ditindak lanjuti oleh Puskesmas untuk diusulkan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi 5. Untuk keluhan terkait kesopanan, kedisiplinan dan keramahan petugas, ditindak lanjuti oleh Kepala UPT Puskesmas melalui pembinaan secara berkala sanggup dibeli oleh Puskesmas dan juga bangunan/gedung Puskesmas
		2. Kursi tunggu pasien yang terbatas karena ruang tunggu yang kurang luas	
2	UPT Puskesmas Cijerah	1. Ruang tunggu yang kurang luas dan kurangnya sarana kursi	
		2. Keterbatasan lahan parkir kendaraan	
		3. Memperbaiki system aplikasi di pendaftaran karena sering mengalami eror ketika melakukan pendaftaran sehingga kecepatan pelayanan dapat ditingkatkan	
3	UPT Puskesmas Sukapakir	Untuk selalu meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas	
4	UPT Puskesmas Cibolerang	1. Sarana dan prasarana dilingkungan puskesmas yang belum memadai	
		2. Menunggu realisasi usulan relokasi ke Dinas Kesehatan untuk peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan puskesmas	
5	UPT Puskesmas Kopo	1. Sarana dan prasarana agar lebih bagus lagi	
		2. Ingin ada dokter spesialis	
		3. Mohon agar lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pemeriksaan agar cepat tertangani dalam penyakit apapun	
6	UPT Puskesmas Mohamad Ramdhan	1. Terus dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan di UPT Puskesmas supaya kedepannya bisa memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan pelanggan.	
		2. Waktu penyelesaian pelayanan di UPT Puskesmas memiliki nilai paling rendah diantara yang lain	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
7	UPT Puskesmas Pasirluyu	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kinerja pelayanan UPT Puskesmas kepada masyarakat, baik dari segi sarana dan prasarana, maupun dari segi kualitas dan kuantitas tenaga2. Bagi masyarakat, semoga lebih aktif memberikan kritik saran kepada Puskesmas Pasirluyu untuk kemajuan mutu dan kinerja pelayanan	(relokasi, renovasi dan penambahan ruangan pelayanan)
8	UPT Puskesmas Talagabodas	Untuk produk spesifikasi jenis layanan di UPT Puskesmas Talagabodas, diperlukan adanya pemberian informasi kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan info di depan gedung Puskesmas Talagabodas atau dalam bentuk Leaflet/Info media sosial/pertemuan linsek/ penyuluhan	
9	UPT Puskesmas Suryalaya	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu meningkatkan kualitas layanan terutama unsur sarana dan prasarana2. Untuk dapat melakukan langkah strategis dalam upaya peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas, seperti perluasan dan penataan tempat parkir, penambahan ventilasi dan pencahayaan ruangan	
11	UPT Puskesmas Cijagra Baru	UPT Puskesmas Cijagra Baru diharapkan dapat memprioritaskan unsur yang mempunyai nilai indeks pelayanan terendah yaitu kualitas sarana dan prasarana, misalnya dengan penambahan alat kesehatan dan ruang pemeriksaan	
12	UPT Puskesmas Margahayu Raya	<ol style="list-style-type: none">1. Responden sangat terbantu dengan adanya hotline di Puskesmas, namun tidak bisa untuk mendaftar pelayanan2. Responden mengharapkan adanya penambahan kursi tunggu didepan puskesmas3. Suara pemanggilan nomer antrian tidak terdengar keluar sehingga satpam harus teriak-teriak4. Penambahan jumlah pasien selama pandemic covid-19	
13	UPT Puskesmas Cipamokolan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP) yang telah ditentukan2. Meningkatkan kualitas serta kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta menjaga	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
		kebersihan dan keteraturan lingkungan Puskesmas	
		4. Bagi masyarakat, agar mematuhi dan memahami alur pelayanan yang telah ditentukan oleh Puskemas Cipamokolan untuk menjaga ketertiban pelayanan	
14	UPT Puskesmas Riung Bandung	Waktu pelayanan dengan nilai terendah, hal ini menjadi sorotan karena kurangnya informasi alur pelayanan yang diberikan.	
15	UPT Puskesmas Cempaka Arum	Hampir seluruh responden sudah cukup puas dengan pelayanan di UPT Puskesmas Cempaka Arum, dengan nilai IKM 93,00	
16	UPT Puskesmas Kujangsari	SDM di UPT Puskesmas Kujangsari sangat terbatas, sehingga perlu adanya pengaturan jadwal pelayanan yang efektif baik pengaturan jadwal pelayanan didalam maupun diluar gedung.	
17	UPT Puskesmas Sekejati	1. Masih adanya area yang kotor dikawasan Puskesmas 2. Ada karyawan yang dinilai kurang ramah kepada pasien	
18	UPT Puskesmas Cilengkrang	1. Pelayanan di BP dipercepat 2. Pelayanan dipenapisan dipercepat 3. Pelayanan difarmasi dipercepat	
19	UPT Puskesmas Cipadung	1. Kecepatan pelayanan masih kurang 2. Keramahan petugas masih kurang terutama dipendaftaran	
20	UPT Puskesmas Cinambo	1. Pelayanan sudah sesuai dengan standar 2. Akses menuju toilet pasien tidak layak 3. Ruang tunggu pasien sempit	
21	UPT Puskesmas Ujung Berung Indah	1. Kurangnya pemahaman mengenai persyaratan pelayanan 2. Kurangnya sosialisasi diri petugas mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan 3. Sarana, kurangnya media penyebaran informasi 4. Metode, sosialisasi tentang kesesuaian persyaratan pelayanan kepada pasien kurang optimal	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
22	UPT Puskesmas Arcamanik	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas security untuk selalu santun dan mengingatkan pasien bila pasien lupa.2. Memperbanyak kursi tunggu, mengingat kursi panjang diruang tunggu yang dahulunya bisa duduk 4 orang sekarang hanya bisa 2 orang saja3. Menambah jumlah staf dibagian farmasi dan pendaftaran sehingga tidak terlalu lama menunggu pendaftaran dan obat	
23	UPT Puskesmas Jajaway	<ol style="list-style-type: none">1. Memaksimalkan ketenagaan untuk pelayanan dalam gedung agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, terutama bagi pasien lansia2. Memberikan informasi kepada pasien untuk persyaratan yang diperlukan dalam proses pendaftaran yaitu kartu berobat, jaminan kesehatan bila memiliki, KTP/KK bagi pasien baru3. Menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan pada pasien saat dipendaftaran4. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam penunjang pelayanan5. Peningkatan perilaku petugas pemberi layanan agar selalu melaksanakan 5S6. Menjalankan kembali kotak saran yang tersedia dimasing-masing ruangan	
24	UPT Puskesmas Pamulang	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkatkan kenyamanan ruang tunggu2. Kurangnya tempat duduk diruang tunggu3. Pelayanan bagus, tapi ruang tunggu sempit	
25	UPT Puskesmas Babakan Sari	<ol style="list-style-type: none">1. Diharapkan adanya pemeriksaan USG di UPT Puskesmas2. Mengharapkan adanya perbaikan toilet pasien, karena toilet yang digunakan kurang nyaman baik dari tata letak, kebersihan maupun penerangannya3. Diharapkan penambahan kursi tunggu pasien4. Diharapkan agar seluruh staf UPT Puskesmas senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan untuk kenyamanan bersama	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
26	UPT Puskesmas Tamblong	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengajukan renovasi atau perluasan ruangan karena ruang tunggu pasien sempit dan kurang sesuai2. Mengajukan penambahan fasilitas kursi untuk diruang tunggu3. Pengadaan rak khusus rekam medis4. Adanya petugas pengarah pasien untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengatur alur pasien diruang tunggu	
27	UPT Puskesmas Balaikota	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan sarana dan prasarana di poli umum, poli gigi dan poli KIA/KB masih terbatas2. Tidak tersedianya kotak saran, kertas dan pilpen untuk menyampaikan pengaduan saran dan masukan	
28	UPT Puskesmas Pasirkaliki	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada tindakan kesgilut2. Ruang tunggu kurang nyaman3. Waktu pelayanan diruang pelayanan umum lama	
29	UPT Puskesmas salam	Merekomendasikan untuk rehabilitasi bangunan mengingat luas bangunan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan	
30	UPT Puskesmas Tamansari	<ol style="list-style-type: none">1. Beberapa pasien terhambat alur pelayanan karena kurang persyaratan pendaftaran atau persyaratan rujukan, harap disosialisasikan atau ditulis2. Masih ada petugas terlambat memulai pelayanan3. Diharapkan petugas lebih komunikatif, tidak judes, galak memperhatikan pemilihan kata pada pasien4. Sarana dan prasarana lebih ditingkatkan karena masih ada keluhan pasien tentang toilet yang tidak ada sabun dan tisu, tidak ada parkir, ruang tunggu yang sempit sehingga masih banyak pasien yang berdiri5. Sarana pengaduan diharapkan ditambah dan disosialisasikan	
31	UPT Puskesmas Padasuka	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur pelayanan, pasien yang mencari rujukan untuk berobat jalan kerumah sakit lain, dipisahkan dengan pasien yang berobat dipuskesmas2. Waktu pelayanan jangan lama	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
		3. Kesesuaian produk layanan, untuk pelayana gigi dan mulut alatnya ditambah lagi jadi kalau ada tindakan tidak harus dirujuk ketempat lain 4. Kompetensi pelayanan, pemeriksaannya harus teliti tidak Cuma ditanya pasiennya aja langsung dikasih resep 5. Kualitas sarana dan prasarana, system pelayanan agar difungsikan secara maksimal agar sesuai dengan fasilitas yang telah dibangun 6. Perilaku petugas, petugas pendaftaran kurang ramah 7. Penanganan pengaduan, untuk kedepannya bila ada keluhan pasien untuk diperiksa bukan hanya ditanya-tanya saja	
32	UPT Puskesmas Neglasari	1. pelayanan lebih maksimal lagi, kalau bisa fasilitas untuk bermain anak dan ruang untuk menyusui 2. ruang tunggu terbatas 3. ditingkatkan untuk kecepatan pelayanan 4. kebersihan agar tetap diperhatikan lagi	
33	UPT Puskesmas Sukawarna	1. karena pandemic covid-19 puskesmas akan memisahkan pelayanan antara pasien dengan gejala ISPA lainnya 2. mengajukan usulan keDinkes untuk menambah tenaga SDM	
34	UPT Puskesmas Sukajadi	1. ruang tunggu didalam kurang nyaman, terlalu sedikit dan sempit 2. lahan parkir sangat sempit dengan jumlah pasien yang berkunjung lumayan banyak, sehingga terlihat sangat berantakan	
35	UPT Puskesmas Karangsetra	3. tingkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pendaftaran 4. tempat sampah kurang 5. tingkatkan keramahan petugas kepada pasien 6. dilengkapi fasilitas pemeriksaan darah 7. perilaku petugas lebih sopan dan ramah	
36	UPT Puskesmas Sukarasa	1. memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP) yang telah ditentukan	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
		<ol style="list-style-type: none">2. meningkatkan kualitas serta kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan3. mematuhi dan memahami alur pelayanan yang telah ditentukan oleh fasilitas kesehatan untuk menjaga ketertiban pelayanan	
37	UPT Puskesmas Sukagalih	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan dan konsisten agar sasaran mutu dapat ditingkatkan2. unsur sarana dan prasarana mendapatkan nilai yang paling rendah, hal ini dikarenakan Puskesmas Sukagalih merupakan puskesmas baru dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai	
38	UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan	<ol style="list-style-type: none">1. kecepatan pelayanan dipercepat2. proses persyaratan pendaftaran lebih dipermudah dalam penggunaan Whatsapp3. kursi ruang tunggu diperbanyak dan tempat tunggu dibuat lebih nyaman4. diadakan toilet khusus pasien yang mudah diakses5. media untuk penyampaian kritik dan saran agar diperjelas	
39	UPT Puskesmas Pasirjati	<ol style="list-style-type: none">1. penanganan pengaduan, sarana dan masukan perlu diperbaiki2. sarana dan prasarana masih kurang3. kompetensi pelaksana perlu ditingkatkan	
40	UPT Puskesmas Pasundan	<ol style="list-style-type: none">1. pada saat memanggil pasien suaranya kurang keras sehingga pasien kurang mendengar2. agar toilet dibersihkan sehingga tidak bau3. lebih cepat lagi dalam menangani pasien	
41	UPT Puskesmas Pasirlayung	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada layanan pengaduan masyarakat2. Sarana dan prasarana masih kurang	
42	UPT Puskesmas Rusunawa	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga dan meningkatkan kebersihan di area ruang tunggu puskesmas2. Memberikan pelayanan yang lebih cepat terhadap pasien	



NO	UPT PUSKESMAS	KELUHAN	PENGELOLAAN
		<ol style="list-style-type: none">Petugas lebih ramah terhadap pasienMeningkatkan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas rusunawaMengefektifkan saran dan prasarana kotak saran agar terdapat masukan dari pengunjung/ pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan	
43	UPT Puskesmas Pasawahan	<ol style="list-style-type: none">Sarana, gedung puskesmas yang harus segera direalisasikan pembangunannya, sehingga proses pelayanan diharapkan lebih optimal dengan didukung sarana yang sesuai standar permenkesPenambahan loket pendaftaran untuk peserta BPJS dengan sarana dan prasarananya seperti yang sudah dijalankan dipuskesmas lain guna mengantisipasi antrian yang menyita waktu tunggu lamaDipenuhi kualitas SDM yang professional dibidangnya serta dilengkapinya sarana dan prasarana menunjang medis terutama untuk penanganan tindakan sedang yang tidak selalu dirujukPerlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Sarana dan prasarana pelayanan yang sudah using kurang mendukung upaya pelayanan yang prima	
44	UPT Puskesmas Mandala Mekar	<ol style="list-style-type: none">Penambahan sarana dan prasarana dengan membangun gedung yang rusak untuk dimanfaatkan sebagai klinik gigi, klinik dots, pojok menyusui, pojok konsultasi dilengkapi dengan peralatan pendukungnyaMemasang papan nama Puskesmas sebagai penunjuk arahMendorong dan meningkatkan motivasipetugas untuk meningkatkan kompetensi dengan mempelajari dengan berbagai literature yang terkait dengan tugasnya dan memfasilitasi petugas untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan tugasnya	



Melihat berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai sarana pengaduan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan melakukan :

1. Kota Bandung memiliki 80 UPT Puskesmas dengan Perwal No 199 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, 30 UPT Puskesmas diantaranya telah BLUD, sehingga dapat membiayai sendiri renovasi Puskesmas, mengontrak bangunan untuk pelayanan pasien yang lebih layak, membeli meubelair dll
2. Pada Tahun 2020 ini juga Dinas Kesehatan merencanakan akan membeli : kursi susun, meja kantor, kursi tunggu
3. Untuk mempercepat waktu pelayanan di UPT Puskesmas, beberapa Puskesmas telah memakai sistem pendaftaran online
4. Untuk meningkatkan keramahan petugas Puskesmas, telah dilaksanakan pembinaan baik oleh Kepala UPT Puskesmas tapi bila belum berhasil akan dilaksanakan pembinaan di tingkat Dinas Kesehatan. Selain ini direncanakan pelatihan seperti pelatihan Customer Servis
5. Di Kota Bandung telah dilaksanakan akreditasi di 66 Puskesmas, sehingga telah terjadi peningkatan mutu dan kinerja pelayanan serta penampilan dan kinerja SDM Puskesmas dalam memberikan pelayanan.



Adapun analisis hasil ikm RS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. RSKGM

Dari hasil laporan IKM semester II tahun 2020, kepuasan masyarakat tertinggi pada biaya (U4) dan kompetensi pelaksana (U6) dan masyarakat merasa kurang puas pada sistem, mekanisme dan prosedur serta kecepatan pelayanan

2. RSUD

Dari hasil laporan IKM RSUD, kepuasan masyarakat tertinggi pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U9) dan pada biaya (U4) dan masyarakat kurang puas pada unsur pelayanan Waktu Penyelesaian (U3) dan Kualitas Pelayanan (U5)

3. RSKIA

Dari hasil laporan IKM Semester II tahun 2020, kepuasan masyarakat tertinggi pada unsur pelayanan : ketersediaan sarana dan prasarana (U8) dan ketersediaan sarana penanganan pengaduan, saran dan masukan (U9), dan masyarakat kurang puas pada kecepatan pelayanan (Waktu Penyelesaian (U3) dan Kualitas Pelayanan (U5)

a. Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

- U 3 : tindak lanjut :dilakukan koordinasi antara Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik, Seksi Keperawatan, komite mutu dan keselamatan pasien, dan komite medis
- U5: tindak lanjut: Dilakukan koordinasi antara seksi pelayanan dan penunjang medik dengan bagian pemasaran dan humas, serta dengan pengaduan pelanggan



- b. Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :
- U9: Melakukan evaluasi mengenai permasalahan yang belum dapat diatasi U8: Melakukan kalibrasi secara periodik dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 84.19 dari target sebesar 79 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106.57 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Adapun rincian nilai IKM di Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Rincian Nilai IKM Puskesmas
Tahun 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	CIBUNTU	83.00	Baik
2	CIJERAH	83.49	Baik
3	CIGONDEWAH	83.79	Baik
4	CARINGIN	82.87	Baik
5	SUKAHAJI	83.18	Baik
6	CIBOLERANG	84.92	Baik
7	SUKA PAKIR	83.36	Baik
8	CITARIP	83.40	Baik
9	KOPO	80.34	Baik
10	PAGARSIH	83.23	Baik
11	LIO GENTENG	83.02	Baik
12	PELINDUNG HEWAN	83.50	Baik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
13	ASTANA ANYAR	83.36	Baik
14	PASUNDAN	83.08	Baik
15	MOHAMAD RAMDAN	83.00	Baik
16	PASIRLUYU	83.00	Baik
17	TALAGABODAS	86.62	Baik
18	SURYALAYA	83.88	Baik
19	CIJAGRA LAMA	83.62	Baik
20	CIJAGRA BARU	83.35	Baik
21	PASAWAHAN	83.07	Baik
22	MENGGER	83.04	Baik
23	KUJANGSARI	86.35	Baik
24	MARGAHAYU RAYA	84.19	Baik
25	SEKEJATI	85.75	Baik
26	DERWATI	84.27	Baik
27	CIPAMOKOLAN	83.12	Baik
28	RIUNG BANDUNG	83.03	Baik
29	CEMPAKA ARUM	93.00	Sangat Baik
30	CILENGKRANG	83.24	Baik
31	CIBIRU	83.08	Baik
32	CIPADUNG	83.05	Baik
33	PANYILEUKAN	83.70	Baik
34	PANGHEGAR	83.12	Baik
35	CINAMBO	83.69	Baik
36	UJUNG BERUNG INDAH	83.25	Baik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
37	ARCAMANIK	85.35	Baik
38	SINDANG JAYA	84.99	Baik
39	RUSUNAWA	83.07	Baik
40	GRIYA ANTAPANI	83.30	Baik
41	ANTAPANI	85.36	Baik
42	JAJAWAY	82.06	Baik
43	MANDALAMEKAR	81.28	Baik
44	PAMULANG	83.02	Baik
45	GIRIMANDE	84.49	Baik
46	BABAKAN SARI	87.95	Baik
47	BABAKAN SURABAYA	83.75	Baik
48	AHMAD YANI	82.00	Baik
49	GUMURUH	84.72	Baik
50	IBRAHIM ADJIE	90.03	Sangat Baik
51	TAMBLONG	83.10	Baik
52	BALAIKOTA	83.48	Baik
53	BABATAN	85.03	Baik
54	GARUDA	87.60	Baik
55	PASIRKALIKI	83.00	Baik
56	SALAM	83.10	Baik
57	TAMANSARI	83.42	Baik
58	PADASUKA	84.50	Baik
59	PASIRLAYUNG	83.04	Baik
60	JATIHANDAP	83.02	Baik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
61	CIKUTRA LAMA	86.28	Baik
62	NEGLASARI	83.33	Baik
63	DAGO	83.00	Baik
64	PUTER	85.83	Baik
65	SEKELOA	83.04	Baik
66	SUKA WARNA	80.00	Baik
67	SUKAJADI	85.07	Baik
68	KARANGSETRA	83.07	Baik
69	LEDENG	85.00	Baik
70	SUKARASA	83.05	Baik
71	SARIJADI	83.30	Baik
72	CIPAKU	84.20	Baik
73	CIUMBULEUIT	83.18	Baik
74	SUKARAJA	84.47	Baik
75	CIGADUNG	83.01	Baik
76	PASIRJATI	83.21	Baik
77	SUKAGALIH	83.86	Baik
78	CIBADUYUT KIDUL	89.25	Sangat Baik
79	CIBADUYUT WETAN	83.00	Baik
80	BABAKAN TAROGONG	80.65	Baik
	JUMLAH	6,713.42	
	Nilai rata-rata (A)	83.92	Baik
	Nilai IKM RS		
1	RSUD	81.21	Baik
2	RSKGM	84.66	Baik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
3	RSKIA	87.52	Baik
	JUMLAH	253.39	
	Nilai rata-rata (B)	84.46	
	Jumlah (A+B)	168.38	
	Nilai rata-rata ©	84.19	Baik

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 80 Puskesmas yang dilakukan pengukuran IKMnya terdapat 3 Puskesmas dengan kriteria **sangat baik** yaitu Cibaduyut Kidul, Ibrahim Adjie dan Cempaka Arum sedangkan 73 Puskesmas masuk dengan Kriteria **baik**.

Faktor pendorong tercapainya target ini adalah karena puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah terakreditasi. Di Kota Bandung ada 66 Puskesmas yang sudah diakreditasi, sehingga baik sarana, prasarana maupun pelayanan sudah lebih baik dan tentu saja hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan puskesmas yaitu masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 maka Realiasi IKM Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2019 dengan Tahun 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM TAHUN 2019	NILAI IKM TAHUN 2020	KINERJA UNIT PELAYANAN	KET
1	CIBUNTU	81.79	83	Baik	Naik
2	CIJERAH	81.17	83.49	Baik	Naik
3	CIGONDEWAH	78.38	83.79	Baik	Naik
4	CARINGIN	81.7	82.87	Baik	Naik
5	SUKAHAJI	82.25	83.18	Baik	Naik
6	CIBOLERANG	78.43	84.92	Baik	Naik
7	SUKA PAKIR	80	83.36	Baik	Naik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM TAHUN 2019	NILAI IKM TAHUN 2020	KINERJA UNIT PELAYANAN	KET
8	CITARIP	82.93	83.4	Baik	Naik
9	KOPO	80.11	80.34	Baik	Naik
10	PAGARSIH	80.08	83.23	Baik	Naik
11	LIO GENTENG	80.23	83.02	Baik	Naik
12	PELINDUNG HEWAN	76.82	83.5	Baik	Naik
13	ASTANA ANYAR	77.49	83.36	Baik	Naik
14	PASUNDAN	78.75	83.08	Baik	Naik
15	M. RAMDAN	79.7	83	Baik	Naik
16	PASIRLUYU	76.45	83	Baik	Naik
17	TALAGABODAS	86.49	86.62	Baik	Naik
18	SURYALAYA	83.85	83.88	Baik	Naik
19	CIJAGRA LAMA	80	83.62	Baik	Naik
20	CIJAGRA BARU	78.34	83.35	Baik	Naik
21	PASAWAHAN	76.75	83.07	Baik	Naik
22	MENGGER	82.19	83.04	Baik	Naik
23	KUJANGSARI	81.15	86.35	Baik	Naik
24	MARGAHAYU RAYA	87.66	84.19	Baik	Turun
25	SEKEJATI	85.66	85.75	Baik	Naik
26	DERWATI	78.09	84.27	Baik	Naik
27	CIPAMOKOLAN	80.26	83.12	Baik	Naik
28	RIUNG BANDUNG	81.15	83.03	Baik	Naik
29	CEMPAKA ARUM	93.5	93	Sangat Baik	Turun
30	CILENGKRANG	78.25	83.24	Baik	Naik
31	CIBIRU	79.24	83.08	Baik	Naik
32	CIPADUNG	78.21	83.05	Baik	Naik
33	PANYILEUKAN	82.28	83.7	Baik	Naik
34	PANGHEGAR	78.61	83.12	Baik	Naik
35	CINAMBO	85.28	83.69	Baik	Naik
36	UJUNG BERUNG INDAH	76.71	83.25	Baik	Naik
37	ARCAMANIK	85.34	85.35	Baik	Naik
38	SINDANG JAYA	80.87	84.99	Baik	Naik
39	RUSUNAWA	83.03	83.07	Baik	Naik
40	GRIYA ANTAPANI	82.13	83.3	Baik	Naik
41	ANTAPANI	85.36	85.36	Baik	Tetap
42	JAJAWAY	81	82.06	Baik	Naik
43	MANDALAMEKAR	81.35	81.28	Baik	Turun
44	PAMULANG	81.32	83.02	Baik	Naik



NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM TAHUN 2019	NILAI IKM TAHUN 2020	KINERJA UNIT PELAYANAN	KET
45	GIRIMANDE	82.89	84.49	Baik	Naik
46	BABAKAN SARI	82.06	87.95	Baik	Naik
47	BABAKAN SURABAYA	70.2	83.75	Baik	Naik
48	AHMAD YANI	80.03	82	Baik	Naik
49	GUMURUH	84.48	84.72	Baik	Naik
50	IBRAHIM ADJIE	81.12	90.03	Sangat Baik	Naik
51	TAMBLONG	78.23	83.1	Baik	Naik
52	BALAIKOTA	86.83	83.48	Baik	Naik
53	BABATAN	86.75	85.03	Baik	Naik
54	GARUDA	90.11	87.6	Baik	Turun
55	PASIRKALIKI	83	83	Baik	Tetap
56	SALAM	80	83.1	Baik	Naik
57	TAMANSARI	83.25	83.42	Baik	Naik
58	PADASUKA	81.12	84.5	Baik	Naik
59	PASIRLAYUNG	68.96	83.04	Baik	Naik
60	JATIHANDAP	76.07	83.02	Baik	Naik
61	CIKUTRA LAMA	80.1	86.28	Baik	Naik
62	NEGLASARI	80.67	83.33	Baik	Naik
63	DAGO	78.01	83	Baik	Naik
64	PUTER	82.98	85.83	Baik	Naik
65	SEKELOA	80.43	83.04	Baik	Naik
66	SUKA WARNA	79.25	80	Baik	Naik
67	SUKAJADI	81.24	85.07	Baik	Naik
68	KARANGSETRA	83.03	83.07	Baik	Naik
69	LEDENG	78.28	85	Baik	Naik
70	SUKARASA	84	83.05	Baik	Naik
71	SARIJADI	80.2	83.3	Baik	Naik
72	CIPAKU	82.02	84.2	Baik	Naik
73	CIUMBULEUIT	80.01	83.18	Baik	Naik
74	SUKARAJA	80.01	84.47	Baik	Naik
75	CIGADUNG	76.91	83.01	Baik	Naik
76	PASIRJATI	79.23	83.21	Baik	Naik
77	SUKAGALIH	80.94	83.86	Baik	Naik
78	CIBADUYUT KIDUL	79.46	89.25	Sangat Baik	Naik
79	CIBADUYUT WETAN	79.97	83	Baik	Naik
80	BABAKAN TAROGONG	79.12	80.65	Baik	Naik
	JUMLAH	6,471.31	6,713.42		

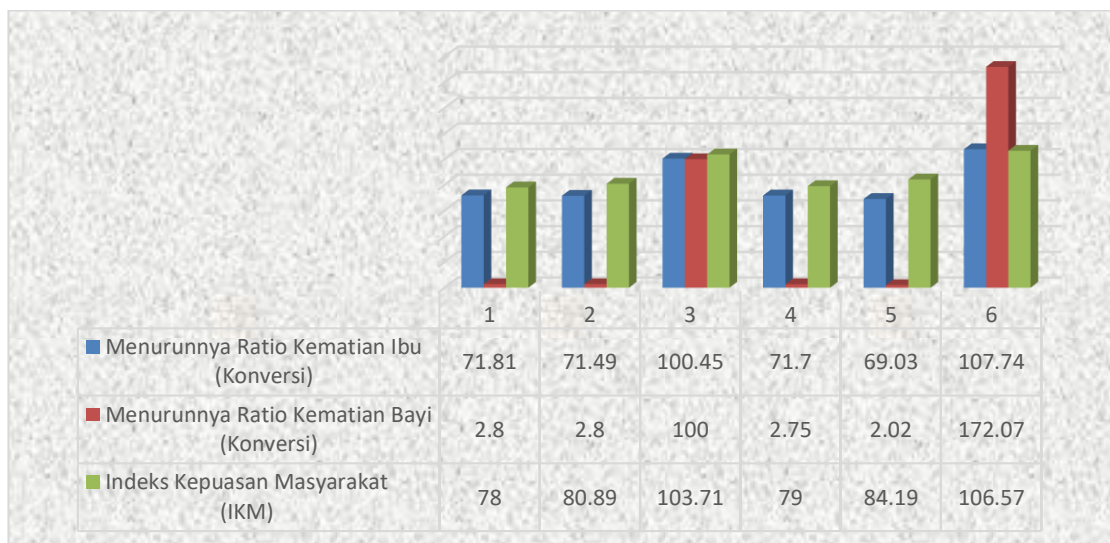


NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM TAHUN 2019	NILAI IKM TAHUN 2020	KINERJA UNIT PELAYANAN	KET
	Nilai rata-rata	80.89	83.92	Baik	Naik

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 4 Puskesmas pada tahun 2020 mengalami penurunan IKMnya yaitu : UPT PKM Garuda, UPT PKM Mandala Mekar, UPT PKM Margahayu Raya, UPT PKM Cempaka Arum . Ada 2 PKM yang nilai IKMnya tetap yaitu UPT PKM Pasirkaliki dan UPT PKM Antapani , sedangkan 74 UPT PKM mengalami kenaikan nilai IKM pada tahun 2020 ini.

Perbandingan realisasi Indikator sasaran 3 antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Sasaran 3 :
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
Tahun 2019 dan Tahun 2020



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa % capaian Indikator Sasaran 3 untuk Indikator Menurunnya ratio kematian ibu pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7.29%. Indikator Menurunnya ratio kematian bayi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar



72.07%, Sedangkan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2020 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2.86%

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 3 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Pencapaian Indikator Sasaran 1
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TW IV TAHUN 2020	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	per 100.000 kelahiran hidup	69.03	71.4	106.87	2.37
2	Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	per 1000 kelahiran hidup	2.02	2.6	157.23	0.58
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84.19	83	106.57	1.19

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran 3 pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 indikator (100%) sudah melebihi Target akhir Renstra Tahun 2023.

Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung sifatnya sangat spesifik disesuaikan dengan tugas fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung , permasalahan dan isu-isu strategis di Kota Bandung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih , hal ini menyebabkan indikator yang dimiliki



Dinas Kesehatan Kota Bandung pada sasaran 3 ini yaitu : Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan IKM berbeda dengan indikator instansi lain sehingga indikator yang dimiliki tidak dapat dibandingkan kinerjanya dengan instansi lain.

Program yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 3 ada 16 program dimana program ini memiliki indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 3.33
Indikator Kinerja Program dan Realisasi Sasaran 3 :
Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan
Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100	100	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dibagi jumlah seluruh sarana & prasarana	%	100	100	100	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Jumlah pengadaan prasarana kedisiplinan pegawai dibagi jumlah pegawai mendapat prasarana kedisiplinan pegawai	%	100	100	100	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase tingkat kesehatan keluarga	Agregat Persentase cakupan pertolongan persalinan di faskes ditambah persentase cakupan pelayanan kesehatan neonatus lengkap ditambah persentase cakupan pelayanan kesehatan balita ditambah persentase cakupan penjangkaran anak sekolah kelas 1 & 7 ditambah persentase cakupan pelayanan usia lanjut dibagi lima indikator dikali 100 Perhitungan berdasarkan indikator SPM kesehatan keluarga menurut Permenkes no 4 tahun 2020 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan	%	79.24	55.48	70.02	Pandemi Covid-19 mengharuskan dilakukan pembatasan layanan, seperti kunjungan sehat (pemeriksaan dan konsultasi kehamilan, pemeriksaan balita, pemberian imunisasi, dll) di Puskesmas, penundaan kegiatan di posyandu dan posbindu serta pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara optimal



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
	Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar	Agregat persentase capaian penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting dibagi 4 indikator dikali 100	%	100	100	100	Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat; Permasalahan gizi yang ditemui di lapangan tetap dilakukan intervensi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan x 100. Berdasarkan Permenkes no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, dokter dan dokter gigi praktek mandiri. Permenkes no 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit	%	38.59	38.59	100	Target telah tercapai, hal ini didukung oleh faktor pendukung seperti pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode zoom meeting/video conference, melakukan penjadwalan ulang kegiatan serta koordinasi dengan kementerian terkait kegiatan pelaksanaan akreditasi di puskesmas.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana RS daerah milik pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana dikali 100%	%	100	100	100	Target tercapai, hal ini didukung oleh adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana RS daerah milik pemerintah yang perlu pemeliharaan sesuai standar dibagi jumlah seluruh sarana prasarana dikali 100%	%	100	100	100	Target telah tercapai. Hasil capaian ini didukung oleh adanya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, sehingga kondisinya saat ini jauh lebih baik dan hal ini diharapkan dapat mendukung mutu pelayanan kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan Pembinaan Lingkungan Sosial		%	100	100	100	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase Kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1 : 30.000 penduduk)	Jumlah kecamatan yang puskesmasnya memenuhi standar WHO dibagi jumlah seluruh kecamatan di kali 100	%	100	100	100	Target telah tercapai. Faktor pendorong capaian ini karena jumlah puskesmas yang ada telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh WHO dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayahnya serta adanya komitmen dari Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	cakupan pelayanan laboratorium kesehatan		%	100	100	100	Capaian kinerja telah sesuai dengan target



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.	Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu	Jumlah warga yang mendapat pelayanan kesehatan gawat darurat dibagi jumlah seluruh penduduk di kali 100%	%	1.6	1.6	100	Target telah tercapai. Capaian ini didukung oleh adanya kerjasama tim, koordinasi lintas sektor dan lintas program secara optimal
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		%	100	100	100	Saat pandemi kegiatan masih tetap dilaksanakan, dengan dukungan kebijakan yang tertuang dalam buku pedoman P2 Covid revisi 5. Kegiatan-kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk ke dalam program esensial. dimana pelayanan esensial merupakan pelayanan kesehatan yang harus tetap berjalan walaupun saat kondisi pandemi
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	Persentase rata-rata indikator peningkatan kompetensi SDM, farmasi dan perbekalan kesehatan, industri rumah tangga pangan, kebijakan serta peraturan yang tersusun sesuai standar peraturan yang berlaku. Permenkes no.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas Perpres No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan	%	77.4	77.4	100	Capaian kinerja telah sesuai dengan target. Hal ini didorong oleh adanya kerjasama lintas sektor. peran serta masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	Jumlah rata-rata Nilai IKM BLUD	%	74.71	74.71	100	Target telah tercapai, hal ini didorong oleh pelayanan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD di puskesmas dan RS, memudahkan puskesmas dan RS memenuhi seluruh kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Pola Pengelolaan UPT Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat	Jumlah Faskes Pemerintah dengan tatalaksana keuangan yang sehat dibagi jumlah seluruh Faskes Pemerintah dikali 100	%	100	100	100	Kegiatan pembinaan masih bisa dilaksanakan meskipun dalam masa pandemi Covid melalui virtual meeting
Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Jumlah faskes pemerintah tingkat pertama yang menggunakan pengembangan SIKDA dibagi jumlah seluruh faskes pemerintah tingkat pertama dikali 100	%	100	100	100	Target telah tercapai, hal ini didukung oleh tersedianya modul penggunaan/manual book aplikasi, adanya kebijakan dalam penggunaan dan evaluasi aplikasi, Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan manajemen kesehatan



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi di kali 100	%	100	100	100	Capaian telah sesuai dengan target, hal ini didorong oleh ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kesesuaian proses penyusunan dan evaluasi dengan mengikuti aturan yang berlaku

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Program pada sasaran 3 beserta faktor pendorong untuk indikator yang tercapai dan faktor penghambat untuk indikator yang tidak tercapai.

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 3 ini adalah 168 Kegiatan . Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34
Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Sasaran 3 :
Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan
Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan Standarisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi	Orang	53	50	94.34	Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes dan Perawat berkerjasama dengan UPELKES Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat hanya bisa direalisasi 30 orang karena aturan dari Upelkes hanya memperbolehkan dalam 1 kelas diklat diisi 30 orang peserta.
Terlaksananya peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT	Orang	200	200	100.00	- Data yang tersedia akurat. - Ketepatan dalam proses pecairan dana.
Tersusunnya rancangan kebijakan dan regulasi kesehatan	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan	Jumlah dokumen Regulasi bidang kesehatan	Dokumen	3	3	100.00	Tersusun 3 (tiga) draft dokumen rancangan produk hukum daerah (peraturan wali kota dan keputusan wali kota). Realisasi keuangan belum tercapai karena kondisi pandemi covid-19 sehingga memberlakukan batasan-batasan dalam



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
							kegiatan (pertemuan yang melibatkan banyak orang).
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia di Dinas Kesehatan	jenis	3	3	100.00	- Jumlah kesesuaian obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia. - Ketepatan dalam proses pecairan dana.
		Jumlah paket obat yang tersedia di Dinas Kesehatan	Jenis	60	60	100.00	
		Kegiatan Kefarmasian & alat kesehatan (DAK)	Tahun	1	1	100.00	- Jumlah kesesuaian obat yang tersedia.
		Jumlah Jenis perbekalan kesehatan sesuai standar di Dinas Kesehatan	jenis	3	3	100.00	- kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun - Belanja Alat kesehatan sudah terealisasi 100%, nilai kontrak dibawah pagu sehingga terjadi efisiensi
		Jumlah Obat sesuai standar di RSUD	Jenis	41	41	100.00	
		Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia RSKIA	Jenis	3	3	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
		Jumlah paket obat yang tersedia di RSKIA	Jenis	26	26	100.00	
		Jumlah jenis obat yang tersedia di RSKGM	Jenis	48	48	100.00	Jumlah jenis obat yang tersedia di RSKGM#Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia RSKGM sesuai dengan target kinerja tercapai sesuai target
		Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia RSKGM	Jenis	3	3	100.00	
		Terlaksananya Pembangunan Rumah sakit	Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	Finishing ruang layanan di rumah sakit	Ruang layanan	3	3
Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	Jumlah unit Bangunan /Sarana Prasarana Gedung RSKGM		Unit	1	1	100.00	pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit	Jumlah paket perencanaan rehab RS	Paket	1	1	100.00	- Kegiatan secara konsisten dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun - terdapat selisih antara Pagu, HPS dari hasil Negosiasi kontrak (efisiensi)



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Kegiatan Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeleur RSKIA	Ruang layanan	4	4	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Terlaksananya Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien	porsi	75000	59888	79.85	Tercapai 79.85% disesuaikan dengan jumlah pasien rawat inap.
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Paket	1	1	100.00	-kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun - Belanja Alat kesehatan sudah terealisasi 100%, nilai kontrak dibawah pagu sehingga terjadi efisiensi
		Jumlah ruangan RSKGM yang memenuhi standar	Unit	14	14	100.00	kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan target , tetapi ada beberapa kegiatan pemeliharaan yang tidak dilaksanakan karena situasi pandemi
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan RSUD yang memenuhi standar	Unit	15	15	100.00	- kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun -Belanja Alat kesehatan sudah terealisasi 100%, nilai kontrak dibawah pagu sehingga terjadi efisiensi
		Jumlah alat kesehatan RSKIA yang memenuhi standar	Unit	14	14	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Terlaksananya Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total	Puskesmas	6	0	0.00	Capaian tidak mencapai target, karena kegiatan mengalami rasionalisasi, dialihkan untuk penanganan Covid-19
Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Jumlah sarana & prasarana yang dipenuhi	Jenis	4	4	100.00	Capaian kinerja telah sesuai target, pengadaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan
Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi	Unit	23	21	91.30	Capaian tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena terdapat 2 faskes yang tidak jadi untuk direhabilitasi
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	7	7	100.00	Capaian sudah sesuai target



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	Faskes	80	122	152.50	1. Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor yaitu dengan Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Orpad Setda Kota Bandung, Asklin Kota Bandung dan Narasumber dari Provinsi yaitu Dr Insi 2. Pelaksanaan Kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan telah dilaksanakan melalui video conference karena situasi pandemi Covid 19 belum berakhir
Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama) sesuai standar	Faskes	50	50	100.00	1. Koordinasi dan kerjasama lintas program 2. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka daring
		Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina	Hattra	75	75	100.00	
Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Lanjutan	Jumlah Laboratorium Klinik sesuai standar	klirik	19	19	100.00	Regulasi , SDM dan Kolaborasi sangat mendorong tercapainya realisasi Pelayanan
		Jumlah FKRTL (RS dan Klinik Utama) sesuai standar	Faskes	21	21	100.00	
Terlaksananya Akreditasi rumah sakit	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Bab yang di lakukan bedah dokumen	Dokumen	14	14	100.00	- Kegiatan penilaian survei verifikasi ke 2 Akreditasi SNARS batal dilaksanakan dan di ganti dengan bedah dokumen sejumlah 16 BAB - mengingat pada masa pandemi covid-19, sehingga kegiatan pertemuan terkait akreditasi ditiadakan
	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Level akreditasi	Level	Paripurna Level	Akreditasi tingkat Madya	100.00	Beberapa Pokja Akreditasi belum lulus karena adanya beberapa unit pelayanan yang baru saja di buka. Sehingga belum memenuhi syarat untuk penilaian. Kegiatan Akreditasi RS tidak dapat dilakukan secara maksimal karena terkendala pandemic Covid -19.
	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Level Akreditasi RSKGM	Level	3	3	100.00	kegiatan kursus singkat / pelatihan berlangsung secara virtual dengan biaya kegiatannya yang tidak sebesar sewaktu sebelum pandemi sehingga realisasi keuangan yang tercapai sangat minim



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID)	Jumlah Alat Laboratorium Umum	Jenis	7	7	100.00	1. Pembuatan SOP baik di BPKA atau pun dinas kesehatan Fleksibel dan simple selaras dengan perundang undangan yang berlaku 2. Pelatihan singkat khusus system pengadaan Covid 19 dan penata usahaan keuangan
		Jumlah Obat & BMHP utk Covid-19	Paket	1	1	100.00	
		Jumlah Alat Laboratorium Kedokteran	Jenis	4	4	100.00	
	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID Tambahan)	Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan	Jenis	10	10	100.00	1. Program kegiatan penanggulangan covid masuk dalam program rutin 2. Pembuatan SOP baik di BPKA atau pun dinas kesehatan Fleksibel dan simple selaras dengan perundang undangan yang berlaku 3. Pelatihan singkat khusus system pengadaan Covid 19 dan penata usahaan keuangan
Terlaksananya pembinaan Kesehatan Keluarga	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga	Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar	Faskes	80	80	100.00	Saat pandemi COVID-19, pembinaan fasyankes melalui komunikasi berbasis teknologi informasi adalah hal yang solutif. Pembinaan kepada seluruh Puskesmas tetap dilakukan melalui WhatsApp Group program kesehatan keluarga dan gizi dan/atau Kepala Puskesmas Kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan via jejaring sosial (WhatsApp Group) ataupun pertemuan secara virtual
		Jumlah Pembinaan gizi masyarakat	Pembinaan	9	9	100.00	
	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga (DAK)	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga	Dokumen	1	1	100.00	Situasi pandemi menyebabkan kegiatan pembinaan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, melalui jejaring media sosial
Terlaksananya Pembinaan Gizi Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	Jumlah Pembinaan gizi masyarakat	kali	9	9	100.00	Kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan via jejaring sosial (WhatsApp Group) ataupun pertemuan secara virtual
		Jumlah faskes yang mendapatkan pembinaan gizi masyarakat sesuai standar	Faskes	80	80	100.00	



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.00	Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan pembinaan dengan konsentrasi massa. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui WhatsApp Group dan pertemuan secara daring.
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas sesuai standar	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SARIJADI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jenis	12	12	100.00	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Kesehatan	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jenis	12	12	100.00	
Terlaksananya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar	kasus	39000	50646	129.86	Pencapaian telah melebihi target. Faktor pendorong : 1. Adanya inovasi RASA Pandu PTM tentang pelayanan terpadu PTM, serta inovasi pencegahan dan pengendalian PTM di Kota Bandung; 2. Evaluasi penyampaian laporan bulanan dan tuntutan mutu pelayanan ;3. Kegiatan rekonsiliasi data kasus kesakitan HT dan DM dengan FKTP swasta dan UPT Puskesmas, Monev kepada UPT dan pemberian feed back triwulanan, bintek online kepada UPT puskesmas dengann cakupan sangat rendah
		Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM	Puskesmas	25	25	100.00	
		Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar	kasus	65000	132662	204.10	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan	Faskes	50	51	102.00	
		Jumlah dokumen kegiatan	Dokumen	5	5	100.00	
		Jumlah BMHP	jenis	3	3	100.00	
							Capaian telah sesuai dengan target, didorong oleh faktor penyelesaian kegiatan sesuai dengan target waktu



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Terlaksananya Kesehatan Jiwa dan Napza	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar	Jiwa	2500	3241	129.64	Capaian telah melebihi target, hal ini didorong oleh faktor adanya kegiatan rekonsiliasi data ODGJ berat dengan FKTP swasta, adanya kelurahan siaga sehat jiwa, Adanya SOP tentang alur penanganan gelandangan psikotik, SOP alur pelayanan ODGJ Berat di UPT Puskesmas, Tersedianya laporan ODGJ by name by address, kegiatan orientasi kesehatan jiwa bagi petugas dan pendampingan psikiater kepada dokter UPT puskesmas
Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan	Faskes	35	36	102.86	Capaian telah melebihi target, didukung oleh faktor : Adanya kegiatan orientasi mengenai deteksi dini gangguan indera bagi petugas kesehatan
Terlaksananya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar	Faskes	66	66	100.00	Capaian kinerja telah sesuai dengan target, hal ini didorong oleh sistem pencatatan dan pelaporan kasus sudah cukup optimal sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat melaporkan kasus secara real time
		Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita)	kasus	37094	41281	111.29	
		Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar	Faskes	59	59	100.00	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	Jumlah mesin foging	Unit	7	7	100.00	Capaian kinerja telah sesuai target
		Jumlah jenis BMHP	Jenis	12	12	100.00	
Peningkatan Imunisasi	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90	100	111.11	Kegiatan imunisasi tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sementara untuk capaian indikator jumlah yang diimunisasi dasar lengkap sebesar 35997 orang, perkembangan Covid 19 menjadi titik hambat dan berdampak langsung pada kunjungan masyarakat
		Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap	Orang	35997	35997	100.00	



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Terlaksananya Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100.00	Indikator cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam telah mencapai target 100%, sementara untuk hasil capaian indikator jumlah penemuan kasus AFP telah melebihi target. Hal ini didukung oleh penanganan kasus sesuai dengan standar
		Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)	kasus	11	12	109.09	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Matra	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah Jemaah Haji yang dilayani	Orang	2464	2464	100.00	Capaian target telah tercapai, walaupun untuk kegiatan pengawalan jemaah haji tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji karena adanya pandemi, namun untuk kegiatan pembinaan terhadap jemaah haji tetap dilaksanakan dalam situasi pandemi
		Jumlah kesehatan matra yang terpantau dan direspon	kegiatan	5	5	100.00	
Terlaksananya penanggulangan gawat darurat terpadu	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DID)	Jumlah Alat Kedokteran Umum Operasional PSC 119 Kota Bandung	Unit	7	7	100.00	- Kinerja tim serta Kerjasama lintas program yang optimal - Sesuai dengan Ketentuan Penyerapan anggaran Dana DID
		Jumlah Wastafel Fortable - COVID	Unit	30	30	100.00	
		Jumlah BMHP utk Covid-19	Tahun	1	1	100.00	
		Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus Operasional PSC 119 Kota Bandung	Unit	2	2	100.00	
		Jumlah APD utk Covid-19	jenis	3	3	100.00	
	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DAK)	Jumlah Mobil Ambulance Transport	Unit	1	0	0.00	Tidak adanya penyedia yang siap karena pengaruh pandemi
	Insentif Tenaga Kesehatan Kota Bandung Jl. WR Supratman No 73 Kota Bandung (Banprov)	Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan Mobilitas	OJ	6915	0	0.00	Ketidak sesuaian juknis yang dibuat oleh Prov, sehingga tidak sesuai dengan kegiatan di UPT P2KT
Terlaksananya Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Puskesmas	80	80	100.00	Adanya dukungan SDM terlatih dan sarana prasarana yang memadai baik di puskesmas maupun dinas dalam mendukung pengembangan SIK; Adanya efisiensi anggaran; Adanya dukungan SDM tertatih, sarana prasarana dan
		Jumlah Faskes yang menerapkan SPGDT	Faskes	12	12	100.00	



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
							anggaran yang memadai untuk mendukung penerapan SPGDT di 12 faskes.
	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan (DAK)	Pengadaan perangkat SIKDA Puskesmas	Unit	38	38	100.00	Adanya dukungan anggaran untuk pengadaan perangkat SIKDA dari DAK; Adanya perbedaan pagu yang ditetapkan oleh kemenkeu dan kemenkes. Untuk pagu DPA mengikuti pagu dari Kemenkeu sebesar Rp. 747.872.600, sedangkan untuk pencairan mengikuti hasil desk dengan Kemenkes yaitu sebesar Rp. 430.998.000 sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya anggaran yang dapat diserap adalah sejumlah pagu hasil desk dengan Kemenkes yang telah diinput di aplikasi KRISNA. Pencairan diluar yang telah diinput di aplikasi KRISNA tidak dapat direalisasikan.
		Pengadaan perangkat SIKDA Dinkes	Unit	2	2	100.00	
	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	Jumlah Unit yang mendapat pengembangan Pengembangan SIM RSUD	Unit	22	22	100.00	- kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun - terjadi pengurangan harga pada waktu negosiasi
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan	Dokumen	8	8	100.00	Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai perencanaan dan evaluasi yang jelas sehingga cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat terpenuhi sesuai target; Efisiensi anggaran.
		Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan	Dokumen	7	7	100.00	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Kesehatan	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bidang Kesehatan yang Akuntabel	laporan	344	344	100.00	Laporan dilaksanakan setiap bulan sesuai target
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan	Unit	1	0	0.00	Rasionalisasi Anggaran
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan	Unit	30	30	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat belanja barang.



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
		Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Unit	13	13	100.00	- Kegiatan secara konsisten dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun -Penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DPA sehingga Penyerapan BBM TW I tidak diserap
		Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSKIA	Unit	4	4	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Lift pada RSUD	set	1	0	0.00	Rasionalisasi Anggaran
Terlaksananya Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan	laporan	1	1	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat belanja barang.
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya RSKIA	Stel	0	0	0.00	Rasionalisasi Anggaran
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan	laporan	12	12	100.00	Penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat belanja air yang tidak seluruhnya direalisasikan karena dianggarkan dalam rangka menghadapi musim kemarau.
		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan	laporan	12	12	100.00	Realisasi kinerja tercapai
		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik RSKGM	laporan	12	12	100.00	Target telah tercapai, waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan oprasional yang terpelihara dan memiliki izin RSKGM	Unit	13	0	0.00	Anggaran dirasionalisasi
Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan	laporan	1	1	100.00	



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK Dinas Kesehatan	laporan	1	1	100.00	Adanya rasionalisasi anggaran; Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat kontrak.
		Jumlah laporan Penyediaan ATK RSKIA	laporan	1	1	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & pengadaan Dinas Kesehatan	laporan	1	1	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat kontrak.
		Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan	1	1	100.00	- Tidak ada pelaksanaan akreditasi shg anggaran tdk dpt diserap dng optimal - penyerapan anggaran untuk dukungan akreditasi tdk dpt diserap dgn optimal dikarenakan masih dlm situasi pandemi
		Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & penggandaan RSKIA	laporan	1	1	100.00	Realisasi kinerja tercapai, terdapat efisiensi anggaran dari beberapa sub kegiatan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dinas Kesehatan	laporan	1	1	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat belanja barang.
		Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan RSUD	laporan	1	1	100.00	- Kinerja terlaksana sesuai rencana kerja (Renja sub bag) - Anggaran tidak diserap seluruhnya dikarenakan ada sisa hasil penawaran dari kontrak barang (ada efisiensi)
		Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	laporan	1	1	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	laporan	1	1	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat belanja barang.
		Jumlah Laporan Penyediaan peralatan rumah tangga RSKIA	laporan	1	1	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Kesehatan	laporan	12	12	100.00	Laporan dilaksanakan tiap bulan, tidak ada kendala.



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
		Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	laporan	1	1	100.00	- Tidak ada pelaksanaan akreditasi shg anggaran tdk dpt diserap dng optimal - penyerapan anggaran untuk dukungan akreditasi tdk dpt diserap dng optimal dikarenakan masih dlm situasi pandemi
Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Kesehatan	laporan	12	12	100.00	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19; Adanya efisiensi anggaran.
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSKIA	laporan	3	3	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan Dinas Kesehatan	laporan	6	6	100.00	Sisa anggaran karena kelebihan harga barang di SSH dibandingkan dengan harga pada saat belanja barang.
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan	laporan	1	1	100.00	kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan RSKIA	laporan	12	12	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan RSKGM	laporan	12	12	100.00	Target telah tercapai, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan	laporan	12	12	100.00	Adanya rasionalisasi anggaran



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	laporan	3	3	100.00	Realisasi anggaran disesuaikan dengan jasa pemeliharaan yang dilakukan; Adanya rasionalisasi anggaran.
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	laporan	1	0	0.00	Kegiatan mengalami rasionalisasi
		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	1	1	100.00	- kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun - Anggaran tidak diserap seluruhnya dikarenakan ada sisa hasil penawaran dari kontrak barang (ada efisiensi)
		Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor RSKIA	laporan	1	1	100.00	Realisasi kinerja tercapai.
Terlaksananya Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	laporan	85	0	0.00	Adanya rasionalisasi anggaran
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Bulan	12	12	100.00	kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja kegiatan pada sasaran 3 beserta faktor pendorong untuk indikator yang tercapai dan faktor penghambat untuk indikator yang tidak tercapai.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran 3 maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.35
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Sasaran 3
Tahun 2020

No	Sasaran 2	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2020		Efisiensi	
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
1	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	per 100.000 kelahiran hidup	71.70	69.03	107.74	797,222,114,217.42	601,426,355,075.00	75.44	53.35
2	Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	per 1000 kelahiran hidup	2.75	2.02	172.07				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	79	84.19	106.57				
		JUMLAH			128.79	797,222,114,217.42	601,426,355,075.00	75.44	53.35

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 3 adalah sebesar 128.79 % , sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 75,44% sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 3 adalah sebesar 53.35 % (128.79 % - 75,44%) .

Adapun dokumentasi kegiatan yang terkait dengan indicator Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian Vitamin A





b. Pertemuan Peningkatan Kualitas Tatalaksana Infeksi Menular Seksual



c. Pertemuan Imunisasi





B.4. Sasaran 4 : Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan

Jumlah indikator kinerja yang digunakan adalah 1 indikator. Sebanyak 1 (100%) indikator sudah mencapai target ,hal ini dapat dilihat seperti pada grafik dibawah ini :

Tabel 3.36
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kepesertaan Masyarakat Miskin Mendapatkan Jaminan
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase masyarakat miskin mandapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100

Masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan adalah Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di Kota Bandung.

Cara Perhitungannya adalah : Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dikali 100%.

Capaian kinerja Indikator kinerja Persentase masyarakat miskin mandapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja nyata sebesar 100 % sudah sesuai dengan target yang ditetapkan 100 % sebanyak 176.906 orang.



Faktor yang mendorong tercapainya target adalah dengan adanya Perwal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Bagi Penduduk Kota Bandung mendorong Dinkes dapat melaksanakan pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bandung.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 4 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Pencapaian Indikator Sasaran 4
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Bandung
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TW I TAHUN 2020	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran 1 pada tahun 2020 yang terdiri dari 1 indikator : 1 indikator (100%) sudah sesuai target akhir Renstra 2023.



Jika dibandingkan dengan maka realisasi Indikator di sasaran 4 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 4
Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		%	2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa % capaian realisasi indikator Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan capaiannya sama Antara tahun 2019 dan 2020 yaitu 100.

Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung sifatnya sangat spesifik disesuaikan dengan tugas fungsinya, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung , permasalahan dan isu-isu strategis di Kota Bandung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih , sehingga untuk indikator pada sasaran 4 ini yaitu : Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan akan berbeda dengan instansi lainnya dan pada akhirnya tidak dapat dibandingkan kinerjanya dengan instansi lain.

Program yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 4 ini adalah sebanyak 1 Program. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 3.39
Indikator Kinerja Program dan Realisasi Sasaran 4 :
Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan
pendanaan pelayanan kesehatan
Tahun 2020

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pendanaan pelayanan kesehatan	Program Jaminan Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pendanaan pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan pendanaan kesehatan dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin yang mendapat jaminan pendanaan kesehatan	persentase	100	100	100

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 4 ini adalah 2 Kegiatan . Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Indikator kinerja kegiatan dan Realisasi Sasaran 4 :
Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan
pendanaan pelayanan kesehatan
Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pendanaan pelayanan kesehatan	Kegiatan Jaminan Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pendanaan pelayanan kesehatan	Orang	170000	176906	104.06	Masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan telah dibayarkan preminya oleh Pemerintah Daerah.



Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
	Jaminan Kesehatan Bagi penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kota Bandung) (Jl. WR Supratman No. 73, Kota Bandung) (Banprov)	Jumlah Premi Jaminan Kesehatan PYDOPD/UHC	orang bulan	1141189	890142	78.00	Masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan telah dibayarkan preminya oleh Pemerintah Daerah. Adanya penambahan pagu dari provinsi di akhir tahun anggaran, sehingga tidak dapat direalisasikan semua.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran 5 maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.41
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PENCAPAIAN SASARAN 4 TAHUN 2020

No	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2020		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
1	Persentase masyarakat miskin mandapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	82,483,131,880.00	76,059,905,570.00	92.21	7.79
		JUMLAH			100	82,483,131,880.00	76,059,905,570.00	92.21	7.79

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 4 adalah sebesar 100 % , sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 92,21 % sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 1 adalah sebesar 7.79% (100% - 92,21%)



Adapun dokumentasi kegiatan yang terkait dengan indicator Sasaran 4 adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan Pelayan Kesehatan rumah sakit



- b. Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan





3.1 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Ringkasan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.42
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	295,447,074,543.00	277,701,501,345.00	93.99
2	Belanja	1,360,969,623,206.88	1,117,669,463,697.00	82.12
3	Belanja Langsung	1,049,702,061,757.42	835,787,264,297.00	79.62
4	Belanja Tidak Langsung	311,267,561,449.46	281,882,199,400.00	90.56
5	Surplus/Defisit	1,065,522,548,663.88	839,967,962,352.00	78.83

Secara keseluruhan Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan (Belum Audit) untuk pendapatan adalah sebesar Rp 277,701,501,345.00 (93.99%), dan belanja sebesar Rp 1,117,669,463,697.00 (82.12%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 281,882,199,400.00 (90.56%) dan belanja langsung sebesar 835,787,264,297.00 (79.62%).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun anggaran 2020 untuk pendapatan adalah meningkat dari 71.02 % pada tahun 2019 menjadi 93.99 % pada tahun 2020. Untuk realisasi belanja meningkat dari 81.91 pada tahun 2019 menjadi 82,12% pada tahun 2020 , Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

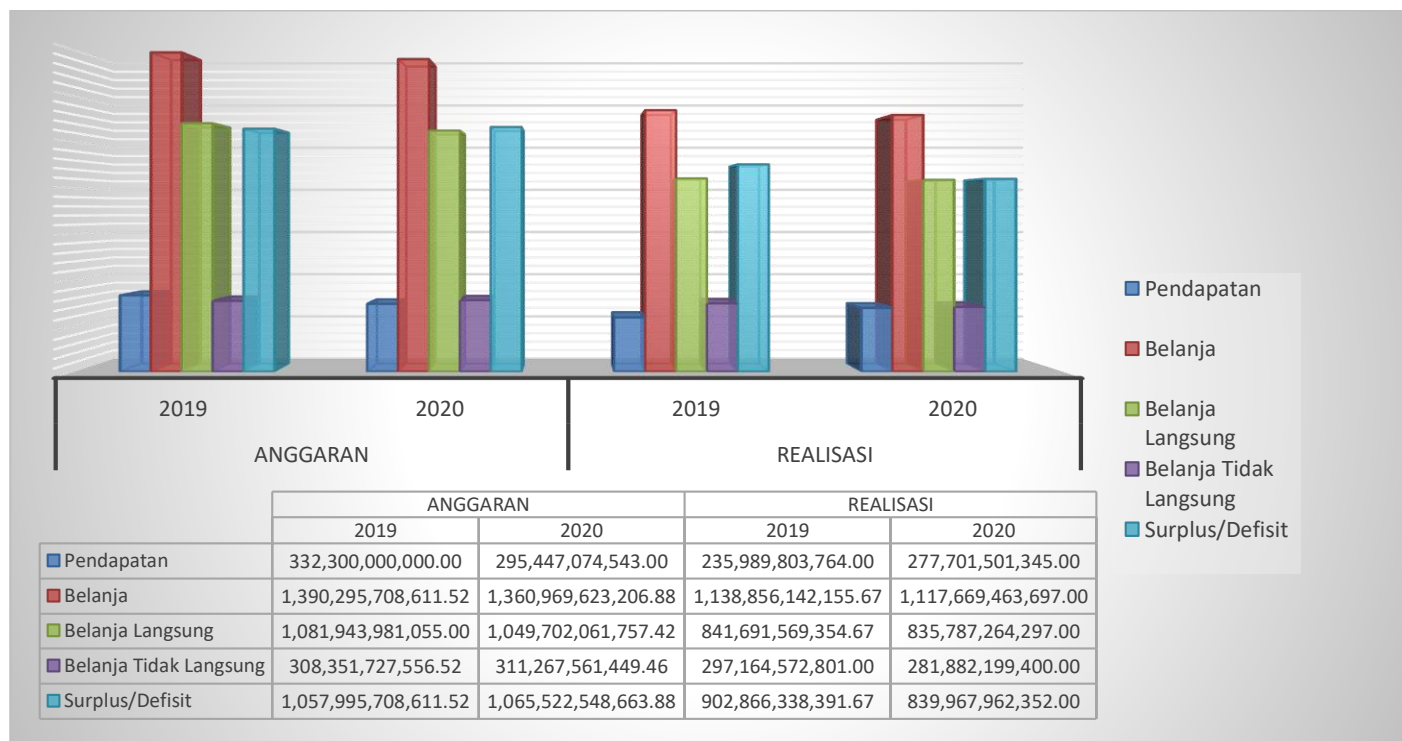


TABEL 3.43
PERBANDINGAN RINGKASAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2019 dan TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		%	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Pendapatan	332,300,000,000.00	295,447,074,543.00	235,989,803,764.00	277,701,501,345.00	71.02	93.99
2	Belanja	1,390,295,708,611.52	1,360,969,623,206.88	1,138,856,142,155.67	1,117,669,463,697.00	81.91	82.12
3	Belanja Langsung	1,081,943,981,055.00	1,049,702,061,757.42	841,691,569,354.67	835,787,264,297.00	77.79	79.62
4	Belanja Tidak Langsung	308,351,727,556.52	311,267,561,449.46	297,164,572,801.00	281,882,199,400.00	96.37	90.56
5	Surplus/Defisit	1,057,995,708,611.52	1,065,522,548,663.88	902,866,338,391.67	839,967,962,352.00	85.34	78.83

Perbandingan Antara pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.4
PERBANDINGAN RINGKASAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2019 dan TAHUN 2020





Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2020.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.44
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2020

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	2,327,740,000.00	2,250,312,705.00	96.67
2	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	167,669,075,660.00	156,050,690,947.00	93.07
3	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	797,222,114,217.42	601,426,355,075.00	75.44
4	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	82,483,131,880.00	76,059,905,570.00	92.21
	Jumlah	1,049,702,061,757.42	835,787,264,297.00	79.62

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp 1,049,702,061,757.42 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp 835,787,264,297.00 atau sebesar 79,62 % .



3.1.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.45
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2,327,740,000.00	2,250,312,705.00	96.67
1	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	202,740,000.00	202,636,130.00	99.95
2	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK)	225,000,000.00	205,341,575.00	91.26
3	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK Fisik)	1,900,000,000.00	1,842,335,000.00	96.97
JUMLAH TOTAL SASARAN 1		2,327,740,000.00	2,250,312,705.00	96.67

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai Sasaran 1 adalah 1 Program 3 Kegiatan . Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp 2,327,740,000.00 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp 2,250,312,705.00 atau sebesar 96,67%.



3.1.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Budaya Hidup Sehat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.46
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN 2
MENINGKATNYA BUDAYA HIDUP SEHAT TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	669,076,000.00	568,672,447.00	84.99
1	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	391,011,000.00	300,086,077.00	76.75
2	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	161,140,000.00	160,585,400.00	99.66
3	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan (DAK)	116,925,000.00	108,000,970.00	92.37
II	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	166,999,999,660.00	155,482,018,500.00	92.81
1	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	166,999,999,660.00	155,482,018,500.00	93.10
JUMLAH TOTAL SASARAN 2		167,669,075,660.00	156,050,690,947.00	93.07

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai Sasaran 2 adalah 2 Program 4 Kegiatan . Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp 167,669,075,660.00 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp 156,050,690,947.00 atau sebesar 93,07%.



3.1.3 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.47
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN 3
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31,712,941,141.00	29,756,905,377.00	93.83
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,512,698,450.00	7,488,195,167.00	87.96
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109,025,000.00	60,676,000.00	55.65
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	0.00	0.00
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	399,597,050.00	375,622,680.00	94.00
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	958,555,400.00	807,462,438.00	84.24
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	537,576,700.00	533,288,958.00	99.20
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,102,087,110.00	2,908,500,611.00	93.76
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	720,971,500.00	720,066,320.00	99.87
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	220,764,990.00	197,204,800.00	89.33
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	427,780,273.00	405,915,856.00	94.89
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	16,534,911,200.00	16,100,225,796.00	97.37
12	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	0.00	0.00	0.00
13	Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	0.00	0.00	0.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,988,695,400.00	1,820,118,206.00	91.52
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	0.00	0.00
2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,988,695,400.00	1,820,118,206.00	91.52
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	425,000.00	413,750.00	97.35
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00
2	Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	425,000.00	413,750.00	97.35
IV	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	121,237,380,446.50	74,578,846,267.00	61.51
1	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	70,182,669,479.00	48,534,903,792.00	69.16



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
2	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)	2,885,196,000.00	405,128,900.00	14.04
3	Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	50,971,000.00	50,923,450.00	99.91
4	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	47,870,000.00	43,526,280.00	90.93
5	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga	163,377,000.00	12,600,000.00	7.71
6	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIKUTRA LAMA	943,384,000.00	468,778,240.00	49.69
7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS LEDENG	668,576,000.00	440,916,334.00	65.95
8	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS KARANGSETRA	382,765,000.00	245,015,105.00	64.01
9	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAWARNA	980,000,000.00	765,870,378.00	78.15
10	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABATAN	1,204,862,000.00	932,949,786.00	77.43
11	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SURYALAYA	154,049,000.00	123,797,000.00	80.36
12	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPAKU	351,378,000.00	267,812,054.00	76.22
13	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABAKAN SURABAYA	1,282,278,000.00	540,026,857.00	42.11
14	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLAYUNG	829,340,000.00	565,563,276.00	68.19
15	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GUMURUH	1,888,403,000.00	1,107,905,219.00	58.67
16	Kegiatan Pelayanan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MOCH RAMDAN	1,552,798,000.00	822,475,512.00	52.97
17	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ASTANA ANYAR	674,673,900.00	312,165,686.00	46.27
18	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAPAKIR	2,266,015,000.00	1,396,161,787.00	61.61
19	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS AHMAD YANI	872,267,000.00	737,700,638.00	84.57
20	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA LAMA	544,872,000.00	448,982,393.00	82.40
21	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLUYU	900,414,180.00	679,426,909.00	75.46
22	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIGONDEWAH	1,497,449,000.00	1,143,536,731.00	76.37
23	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Babakan Tarogong	213,921,900.00	40,126,450.00	18.76
24	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJERAH	1,433,770,000.00	938,948,145.00	65.49
25	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JATIHANDAP	454,231,000.00	331,616,483.00	73.01
26	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS LIO GENTENG	280,000,000.00	207,483,541.00	74.10



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
27	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBOLERANG	1,050,729,000.00	671,933,638.00	63.95
28	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA BARU	382,117,800.00	294,754,404.00	77.14
29	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PELINDUNG HEWAN	724,837,000.00	496,173,322.00	68.45
30	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul	191,421,900.00	50,765,000.00	26.52
31	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPADUNG	1,917,171,000.00	964,487,860.00	50.31
32	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAHAJI	2,563,730,000.00	1,583,151,505.00	61.75
33	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PANYILEUKAN	599,679,000.00	462,346,376.00	77.10
34	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ANTAPANI	963,005,432.00	654,806,958.00	68.00
35	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MANDALAMEKAR	163,968,000.00	139,975,432.00	85.37
36	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan	180,921,900.00	0.00	0.00
37	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CILENGKRANG	854,970,000.00	473,612,449.00	55.40
38	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JAJAWAY	183,082,000.00	168,085,661.00	91.81
39	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PAMULANG	383,479,000.00	331,404,821.00	86.42
40	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASAWAHAN	421,387,000.00	235,678,570.00	55.93
41	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GIRIMANDE	218,190,000.00	190,283,761.00	87.21
42	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DERWATI	816,000,000.00	544,021,528.00	66.67
43	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS RUSUNAWA	794,066,000.00	548,403,619.00	69.06
44	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CEMPAKA ARUM	311,432,000.00	236,818,222.00	76.04
45	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKEJATI	856,545,000.00	581,890,155.00	67.93
46	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BALAIKOTA	622,549,000.00	501,452,176.00	80.55
47	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DAGO	2,557,778,000.00	1,596,233,298.00	62.41
48	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MENGGER	252,802,000.00	220,535,848.00	87.24
49	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SARIJADI	915,086,000.00	421,918,363.00	46.11
50	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKELOA	602,970,000.00	312,615,483.00	51.85



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
51	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS TAMANSARI	794,673,000.00	327,143,943.00	41.17
52	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pasirjati	191,000,000.00	32,211,300.00	16.86
53	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cipamokolan	185,921,900.00	62,713,560.00	33.73
54	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pagarsih	63,989,750.00	56,014,200.00	87.54
55	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Puter	167,920,800.00	77,648,820.00	46.24
56	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Sukarasa	85,924,000.00	25,141,050.00	29.26
57	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Riung Bandung	65,900,000.00	47,512,100.00	72.10
58	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukaraja	93,615,400.00	36,573,490.00	39.07
59	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cigadung	13,714,400.00	12,959,909.00	94.50
60	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Panghegar	94,421,750.00	1,100,000.00	1.16
61	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukagalih	242,921,255.50	81,215,200.00	33.43
62	Kegiatan Penurunan AKI AKB (DAK)	6,725,475,000.00	0.00	0.00
63	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Salam	129,920,000.00	14,187,500.00	10.92
64	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cinambo	139,946,700.00	36,910,500.00	26.37
65	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat (DAK)	750,000,000.00	462,825,300.00	61.71
66	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga (DAK)	258,589,000.00	59,000,000.00	22.82
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat -lama	7,543,854,000.00	1,856,738,923.00	24.61
67	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	7,543,854,000.00	1,856,738,923.00	24.61
V	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	9,276,388,600.00	2,831,413,668.00	30.52
1	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	60,605,000.00	47,303,476.00	78.05
2	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	298,937,600.00	204,202,402.00	68.31
3	Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)	8,610,822,000.00	2,383,334,790.00	27.68
4	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	27,364,000.00	3,700,000.00	13.52
5	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Dasar	188,360,000.00	117,600,750.00	62.43



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
6	Kegiatan Akreditasi Puskesmas	20,000,000.00	19,200,000.00	96.00
7	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Lanjutan	70,300,000.00	56,072,250.00	79.76
VI	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	69,036,116,334.00	67,170,576,797.00	97.30
1	Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	13,911,195,900.00	13,868,304,387.00	99.69
2	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	1,537,313,800.00	1,062,581,092.00	69.12
3	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)	2,958,911,195.00	2,958,459,000.00	99.98
4	Pengadaan Alat Alat Kesehatan (Banprov)	50,228,695,439.00	48,885,771,318.00	97.33
5	Kegiatan Pengadaan Mebeleair Rumah Sakit	400,000,000.00	395,461,000.00	98.87
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata -rev	24,350,394,956.07	12,247,379,698.00	50.30
6	Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	126,980,900.07	124,503,127.00	98.05
7	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit	140,000,000.00	114,400,000.00	81.71
8	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)	4,345,737,805.00	4,193,140,313.00	96.49
9	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Banprov)	19,737,676,251.00	7,815,336,258.00	39.60
VII	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	2,016,248,919.00	1,704,130,465.00	84.52
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	403,903,000.00	362,944,615.00	89.86
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1,612,345,919.00	1,341,185,850.00	83.18
VIII	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	4,788,506,800.00	4,304,153,885.00	89.89
1	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	3,938,666,200.00	3,790,335,885.00	96.23
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	101,968,000.00	82,820,000.00	81.22
3	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan (DAK)	747,872,600.00	430,998,000.00	57.63
IX	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	6,126,750,461.00	5,009,061,037.00	81.76
1	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	5,480,175,461.00	4,411,488,237.00	80.50
2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif Maupun Kuratif / Rehabilitatif	471,575,000.00	452,181,030.00	95.89
3	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	175,000,000.00	145,391,770.00	83.08
X	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	12,929,845,870.00	11,683,297,818.00	90.36
1	Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	3,378,956,500.00	2,763,353,865.00	81.78
2	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	529,720,500.00	454,371,500.00	85.78
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	712,464,700.00	667,989,300.00	93.76



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
XI	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	12,694,795,280.83	11,864,312,488.00	93.46
1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID)	4,080,627,936.83	3,951,479,488.00	96.84
2	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DID)	3,915,756,063.17	3,803,068,192.00	97.12
3	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DAK)	750,000,000.00	0.00	0.00
4	Insentif Tenaga Kesehatan Kota Bandung Jl. WR Supratman No 73 Kota Bandung (Banprov)	342,000,000.00	0.00	0.00
XII	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.	5,007,756,063.17	3,803,068,192.00	75.94
1	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DID)	3,915,756,063.17	3,803,068,192.00	97.12
2	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DAK)	750,000,000.00	0	0.00
3	Insentif Tenaga Kesehatan Kota Bandung Jl. WR Supratman No 73 Kota Bandung (Banprov)	342,000,000.00	0	0.00
XIII	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9,527,141,800.00	8,395,984,424.00	88.13
1	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	28,100,000.00	27,787,500.00	98.89
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	140,100,000.00	131,937,500.00	94.17
3	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	15,900,000.00	15,460,000.00	97.23
4	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	289,320,000.00	280,238,120.00	96.86
5	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	53,322,400.00	25,644,900.00	48.09
6	Pelayanan Kesehatan Matra	255,770,000.00	198,050,650.00	77.43
7	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	127,195,000.00	108,584,720.00	85.37
8	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)	143,000,000.00	140,017,550.00	97.91
9	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)	100,000,000.00	0.00	0.00
10	Kegiatan Pencegahan & Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)	0.00	0.00	0.00
11	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	6,974,434,400.00	6,296,634,084.00	90.28
12	Kegiatan Pendukung Peningkatan Imunisasi (DAK)	1,400,000,000.00	1,171,629,400.00	83.69
XIV	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	82,774,139,100.00	80,414,550,493.00	97.15
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan	90,000,000.00	68,418,500.00	76.02
2	Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	39,380,000.00	34,858,300.00	88.52
3	Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	78,426,094,800.00	76,978,376,184.00	98.15
4	Kegiatan Standarisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	760,116,300.00	559,891,300.00	73.66
5	Kegiatan Pengawasan Obat & Makanan (DAK)	307,471,000.00	296,000,400.00	96.27
6	Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik (DAK)	117,390,000.00	62,071,600.00	52.88
7	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0.00	0.00	0.00
8	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (DAK)	125,050,000.00	76,750,700.00	61.38



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
9	Kegiatan Kefarmasian & alat kesehatan (DAK)	2,908,637,000.00	2,338,183,509.00	80.39
XV	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	340,095,142,045.85	228,737,847,569.00	67.26
1	Kegiatan Pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	5,380,580,500.00	4,590,256,252.00	85.31
2	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT)	479,938,686.00	138,337,300.00	28.82
3	Kegiatan Pelayanan BLUD	35,489,073,867.00	18,602,869,695.00	52.42
4	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CARINGIN	8,110,851,746.00	2,626,107,555.00	32.38
5	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIBIRU	1,701,281,524.00	1,451,675,548.00	85.33
6	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CINAMBO	1,379,690,116.00	979,507,561.00	70.99
7	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIPAMOKOLAN	2,336,068,180.00	1,501,090,428.00	64.26
8	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CITARIP	6,925,648,576.00	3,146,044,767.00	45.43
9	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIUMBULEUIT	3,191,465,546.85	1,457,843,621.00	45.68
10	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA	5,517,272,362.00	4,427,632,730.00	80.25
11	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GRIYA ANTAPANI	1,354,957,134.00	1,172,366,809.00	86.52
12	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS KUJANGSARI	2,208,964,158.00	1,517,248,518.00	68.69
13	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS NEGLASARI	2,314,228,446.00	1,559,527,012.00	67.39
14	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PADASUKA	4,309,618,764.00	3,436,579,133.00	79.74
15	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PAGARSIH	1,775,525,173.00	1,526,298,912.00	85.96
16	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASIRKALIKI	5,866,343,681.00	3,040,132,615.00	51.82
17	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASUNDAN	2,506,877,142.00	1,768,423,508.00	70.54
18	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PUTER	4,363,610,962.00	2,293,662,987.00	52.56
19	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SALAM	1,037,778,914.00	425,479,975.00	41.00
20	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SINDANGJAYA	2,355,885,739.00	1,079,574,210.00	45.82
21	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKAJADI	3,587,828,904.00	1,854,161,357.00	51.68
22	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKARASA	2,508,195,305.00	1,838,417,348.00	73.30
23	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TALAGABODAS	1,562,952,381.00	1,336,441,768.00	85.51
24	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TAMBLONG	1,885,989,952.00	1,308,060,639.00	69.36
25	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN GIGI MULUT (RSKGM)	30,623,857,613.00	14,076,998,580.00	45.97
26	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG (RSUD)	137,837,350,579.00	101,707,629,740.00	73.79
27	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS ARCAMANIK	2,459,497,742.00	1,433,097,122.00	58.27
XVI	Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan	56,115,592,000.00	55,247,556,018.00	98.45
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Kesehatan	56,115,592,000.00	55,247,556,018.00	98.45
JUMLAH TOTAL SASARAN 3		797,222,114,217.42	601,426,355,075.00	75.44



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai Sasaran 4 adalah 16 Program 168 Kegiatan . Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran 3 Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp 797,222,114,217.42 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp 601,426,355,075.00 atau sebesar 75,44%.

3.1.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 4 yaitu Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.48
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN 4
MENINGKATNYA KEPESERTAAN MASYARAKAT MISKIN
MENDAPATKAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	82,483,131,880.00	76,059,905,570.00	92.21
1	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	53,382,802,280.00	53,361,284,570.00	99.96
2	Jaminan Kesehatan Bagi penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kota Bandung) (Jl. WR Supratman No. 73, Kota Bandung) (Banprov)	29,100,329,600.00	22,698,621,000.00	78.00
JUMLAH TOTAL SASARAN 4		82,483,131,880.00	76,059,905,570.00	92.21

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai Sasaran 4 adalah 1 Program 2 Kegiatan . Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp 82,483,131,880.00 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp 76,059,905,570.00 atau sebesar 92,21%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2020 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kota Bandung 2020. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Meningkatnya Rumah Sehat	68	72.03	105.93
2	Meningkatnya Budaya Hidup Sehat	Menurunnya persentase balita gizi buruk	0.356	0.305	133.44
		Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	9.6	50.33	524.27
		Indeks Keluarga Sehat	0.2	0.17	85
3	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan	Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)	71.70	69.03	107.74



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)	2.75	2.02	172.07
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	84.19	106.57
4	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100	100	100

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran , 8 indikator tersebut di atas , secara umum diperoleh hasil bahwa 6 indikator (75 %) melebihi/melampaui target, 1 indikator (12,5%) sesuai target, 1 indikator (12,5%) sesuai target.

Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator tersebut di atas adalah :

1. **Meningkatnya Rumah Sehat** , faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. Optimasi kegiatan perbaikan rumah /Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Kelurahan ODF (akses sanitasi dasar/ jamban sehat meningkat sebanyak 5% dari tahun 2019)
 - c. Meningkatnya akses air minum sebagai salah satu indikator penunjang rumah sehat
2. **Menurunnya persentase balita gizi buruk** , faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. sistem surveilans gizi melalui aplikasi e-PPGBM, sehingga setiap penemuan kasus gizi buruk dapat langsung dilakukan penanganan intervensi sesuai standar berupa pemberian makanan tambahan (PMT) Pemulihan maupun peningkatan pemahaman ibu dan keluarga mengenai pengasuhan serta asupan gizi seimbang melalui konseling terintegrasi.



- b. Keberadaan kader posyandu yang aktif di tiap wilayah menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target dimana para kader di Kota Bandung mempunyai wadah organisasi khusus berupa FORKAGI (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader FORKAGI ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.
3. **Meningkatnya Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri**, faktor yang mendorong tercapainya target adalah :
 - a. Peningkatan peran serta aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan kelurahan siaga aktif
 - b. Meningkatnya dukungan Camat dan Lurah dalam pembuatan peraturan ataupun koordinasi dengan sektor kesehatan untuk kegiatan kelurahan siaga aktif
 - c. Meningkatnya dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha terutama untuk penanggulangan Siaga Covid 19
4. **Menurunnya Ratio Kematian Ibu (Konversi)** ,faktor pendorongnya adalah;
 - a. Pendistribusian Buku KIA tahun 2020 telah mencakup semua sasaran ibu hamil di Kota Bandung sehingga pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor dapat digunakan secara optimal dalam pemantuan kesehatan pada ibu hamil. Dengan terdistribusinya buku KIA maka kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas dapat dikenali sedini mungkin sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan kasus komplikasi.
 - b. Peningkatan pelayanan di fasilitas Kesehatan Kota Bandung melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi dokter umum. Hal ini dapat menekan kejadian komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan upaya skrining faktor resiko.



- c. Sebagian besar ibu hamil, bersalin dan nifas di Kota Bandung telah memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas
5. **Menurunnya Ratio Kematian Bayi (Konversi)** ,faktor pendorongnya adalah :
- a. Penguatan pemanfaatan buku KIA di masyarakat yang melibatkan keluarga dan lintas sektor terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui peningkatan risiko komplikasi maupun tanda bahaya pada bayi serta dapat segera mengambil keputusan untuk dilakukan penanganan yang tepat dan cepat apabila terjadi kegawatdaruratan.
 - b. Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung, baik penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menangani kegawatdaruratan perinatal maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada bayi melalui pelatihan serta orientasi pelayanan penanganan pra rujukan, penanganan kegawatdaruratan dan komplikasi.
 - c. Kota Bandung telah memfasilitasi penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, termasuk bayi. Hal ini diharapkan dapat membantu keluarga dalam mengambil keputusan dengan cepat saat terjadi kegawatdaruratan maupun komplikasi pada bayi.
 - d. Perbaikan sistem pelaporan kematian di tingkat Rumah Sakit dan Klinik, sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian bayi sudah baik
6. **Nilai IKM**, Faktor pendorong tercapainya target ini adalah karena puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah terakreditasi. Di Kota Bandung ada 66 Puskesmas yang sudah diakreditasi, sehingga baik sarana, prasarana maupun pelayanan sudah lebih baik dan tentu saja hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan puskesmas yaitu masyarakat.



7. **Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan**, factor pendorongnya adalah dengan adanya Perwal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Bagi Penduduk Kota Bandung mendorong Dinkes dapat melaksanakan pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bandung.

Adapun factor penghambat dari tidak tercapainya **Indeks Keluarga Sehat** adalah sebagai berikut :

- a. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih terbilang program baru sehingga belum dapat diselenggarakan secara optimal. Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020 semakin memperberat kondisi ini, karena Puskesmas tidak dapat melakukan kunjungan lapangan secara optimal.
- b. Ditemukan pula permasalahan dari sisi ketenagaan Puskesmas dimana saat ini tenaga kontrak yang melakukan pendataan ke lapangan semakin berkurang jumlahnya sehingga kegiatan PIS-PK menjadi terhambat.
- c. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah.
- d. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.



Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan cakupan *total coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- b. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur 30.68%, Penderita Gangguan Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan 39.59%, Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok 41.68%);
- d. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- f. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- g. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 25 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG**

dr.Hj. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196207163 198803 2 006